

**IMPLIKASI PENETAPAN WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN
INDUSTRI (WPPI) TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI
PROVINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh:

**NI PUTU FISKA SISTA
NPM 2120051006**



**MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

ABSTRAK

IMPLIKASI PENETAPAN WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI (WPPI) TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROVINSI LAMPUNG

Oleh

Ni Putu Fiska Sista

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengidentifikasi potensi masing-masing Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung; (2) menganalisis perubahan struktur ekonomi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung; dan (3) menganalisis perkembangan pola ruang dan struktur ruang di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Lampung. Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis *Location Quotient*, analisis *Shift Share* dan analisis *overlay* peta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Sektor Industri pengolahan mengalami perubahan menjadi sektor basis di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan. (2) Sektor industri pengolahan di Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Selatan termasuk dalam Kuadran III setelah adanya penetapan WPPI yang artinya sektor tersebut tumbuh cepat namun tidak berdaya saing (3) Rencana pengembangan kawasan industri berdampak pada penambahan luasan kawasan industri dari yang sebelumnya 19102,282 Ha menjadi 35806,914 Ha dan memiliki infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang kawasan industri dalam peningkatan pengembangan wilayah di sektor industri di Provinsi Lampung.

Kata Kunci : Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, Pengembangan Wilayah, Provinsi Lampung

ABSTRACT

**IMPLICATIONS OF THE ESTABLISHMENT OF
INDUSTRIAL GROWTH CENTER AREAS (WPPI) ON
REGIONAL DEVELOPMENT IN LAMPUNG PROVINCE**

By

Ni Putu Fiska Sista

This study aims to (1) identify the potential of each Lampung Province Industrial Growth Center Region; (2) analyze changes in the economic structure of the Lampung Province Industrial Growth Center Region; and (3) analyze the development of spatial patterns and spatial structure in the Lampung Industrial Growth Center Region. In this study using Location Quotient analysis method, Shift Share analysis and map overlay analysis. The results showed that (1) The manufacturing industry sector has changed into a basic sector in Central Lampung and South Lampung regencies. (2) The manufacturing industry sector in Central Lampung, Tanggamus, and South Lampung is included in Quadrant III after the establishment of WPPI which means that the sector is growing fast but not competitive (3) The industrial estate development plan has an impact on increasing the area of the industrial estate from the previous 19102.282 Ha to 35806.914 Ha and has industrial infrastructure and industrial estate supporting infrastructure in increasing regional development in the industrial sector in Lampung Province.

Keywords: Industrial Growth Center Area, Regional Development, Lampung Province

**IMPLIKASI PENETAPAN WILAYAH PUSAT
PERTUMBUHAN INDUSTRI (WPPI) TERHADAP
PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROVINSI LAMPUNG**

Oleh:

Ni Putu Fiska Sista

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA

Pada
Program Studi

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Pascasarjana Multidisiplin Universitas Lampung



**MAGISTER PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA
PROGRAM PASCASARJANA MULTIDISIPLIN
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2024**

Judul Tesis : **IMPLIKASI PENETAPAN WILAYAH
PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI (WPPI)
TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH
DI PROVINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : *Ni Putu Fiska Sista*

Nomor Pokok Mahasiswa : 2120051006

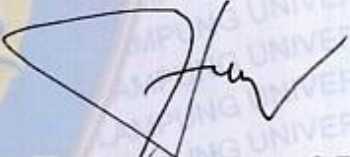
Program Studi : Magister Perencanaan Wilayah dan Kota

Fakultas : Pascasarjana Multidisiplin

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing


Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002


Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T.
NIP. 197505152002121007

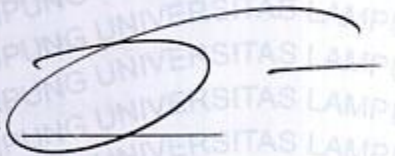
2. Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota
Universitas Lampung


Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si.
NIP. 196407241989021002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

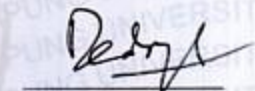
Ketua : **Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si**



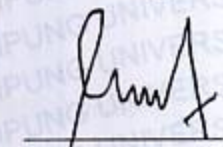
Sekretaris : **Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T.**



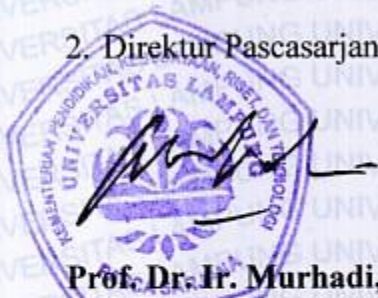
Penguji
Bukan Pembimbing : **Dr. Dedy Yulawan, S.E., M.Si.**



Anggota : **Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si.**



2. Direktur Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.
NIP.196403261989021001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **02 Februari 2024**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul **“IMPLIKASI PENETAPAN WILAYAH PUSAT PERTUMBUHAN INDUSTRI (WPP) TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH DI PROVINSI LAMPUNG”** adalah karya saya sendiri serta tidak melakukan penjiplakan ataupun pengutipan atas karya penulisan lain dengan cara tidak sesuai etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik ataupun yang biasa disebut plagiarisme.
2. Hal intelektual atas karya ini akan diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang akan diberikan kepada saya, serta saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2024

Yang membuat pernyataan



Ni Putu Fiska Sista

NPM. 2120051006

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di ibukota di Provinsi Lampung yakni Kota Bandar Lampung pada Hari Senin, 01 Desember 1997. Penulis sendiri merupakan anak sulung dari 2 (dua) bersaudara dengan adik laki-laki bernama Komang Ray Anggara yang merupakan anak kandung dari pasangan Bapak I Nyoman Suwardana dan Desak Ketut Kerti. Penulis menyelesaikan studi tingkat Taman Kanak-Kanak (TK) di TK 02 Yapindo pada tahun 2009, tingkat Sekolah Dasar (SD) di SD 02 Yapindo tahun 2010, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Yapindo tahun 2013, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMAS Sugar Group B Mataram . Penulis terdaftar sebagai mahasiswa Strata Satu (S1) di Jurusan Teknologi Infrastruktur dan Kewilayahan (JTIK) dengan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) di Institut Teknologi Sumatera tahun 2021. Serta penulis melanjutkan Pendidikan ke jenjang Strata Dua (S2) di Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung.

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, tesis ini kupersembahkan kepada:

Ibuku dan Bapakku Tersayang

Sebagai tanda hormat, bakti, serta rasa terima kasih yang tidak terhingga maka kupersembahkan karya kecil ini kepada ibu dan bapak yang telah memberikan kasih sayang tulus, segala dukungan baik moril dan material, cinta kasih, kesabaran, serta doa yang selalu dipajatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kepadaku

SAWACANA

Segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, hidayat, dan keberkahan-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Implikasi Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) Terhadap Pengembangan Wilayah di Provinsi Lampung”. Penulis menyadari dalam penyelesaian tesis ini tidak akan dapat terealisasi dan terwujud dengan baik tanpa adanya dukungan, bantuan, serta bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini dengan segala ketulusan hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Lampung.
3. Dr. Ir. Muhammad Irfan Affandi, M.Si selaku Ketua Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota sekaligus dosen pembimbing pertama atas ketulusan hati serta memiliki kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi, saran, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.
4. Almarhum Dr. Ir. R. Hanung Ismono, M.P. selaku pembimbing pertama saya atas segala arahan, bimbingan, masukan, motivasi, saran, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses pengerjaan tesis hingga seminar proposal.
5. Dr. Henky Mayaguezz, S.Pi., M.T selaku dosen pembimbing kedua atas ketulusan hari serta memiliki kesabaran dalam memberikan arahan, bimbingan, masukan, motivasi, saran, nasihat, dan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.

6. Dr. Dedy Yuliawan, S.E., M.Si. selaku penguji pertama atas ketulusan hati dalam memberikan masukan, arahan, saran, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.
7. Dr. Maya Riantini, S.P., M.Si selaku penguji pertama atas ketulusan hati dalam memberikan masukan, arahan, saran, serta ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama proses penyempurnaan tesis.
8. Seluruh dosen pengajar dan staf administrasi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Lampung atas bantuan serta ilmu dan pelajaran yang bermanfaat dalam proses pembelajaran dan penyelesaian akademik.
9. Terima kasih kepada terhadap narasumber yang telah membantu dalam penelitian di Instansi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung yakni Ibu Vika Vitri Indra B S.T., M.Sc, Bapak M. Okta Pura Nugraha S.T. yang telah membantu memberikan bantuan dalam penyelesaian pengambilan data penelitian.
10. Ayahanda I Nyoman Suwardana dan Ibunda Desak Ketut Kerti yang telah memberikan bantuan berupa dukungan, motivasi, serta finansial untuk terus menimba ilmu dengan sebaik-baiknya.
11. Saudara laki-laki saya Komang Ray Anggara yang telah memberikan bantuan berupa dukungan serta motivasi untuk dapat menyelesaikan tesis sesuai dengan waktunya.
12. Rekan-rekan serta Mahasiswa Perencanaan Wilayah dan Kota tahun 2021 yang selalu mendampingi, mendengarkan cerita, pemberi saran, memotivasi saya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah.

Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak lepas dari kesalahan dan masih terdapat ketidaksempurnaan. Akan tetapi, penulis berharap bahwa hasil dari penelitian tesis yang telah didapatkan mampu memberikan manfaat dan ilmu bagi bidang akademik dan non akademik dimasa yang akan datang agar dapat membenahi penataan wilayah menuju kawasan yang berkelanjutan nantinya. Penulis memohon maaf terhadap segala kekurangan terhadap kebaikan berbagai pihak atas semua hal yang telah diberikan kepada penulis.

Bandar Lampung, 2024

Ni Putu Fiska Sista

DAFTAR ISI

ABSTRAK	1
ABSTRACT	2
DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	8
A. Teori Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan dalam Pengembangan Wilayah.....	8
1. Teori Kluster Industri.....	8
2. Teori Kutub Pertumbuhan.....	9
3. Teori Basis Ekonomi.....	10
B. Kebijakan Tata Ruang dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Lampung.....	11
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024)	11
2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035.....	12
3. Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035.....	14
4. Permen ATR/ BPN RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota	16
C. Konsep Pola Ruang dan Struktur Ruang	16
D. Penelitian Terdahulu	19

E. Kerangka Pemikiran	25
III. METODE PENELITIAN.....	27
A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional.....	27
B. Jenis dan Sumber Data.....	28
C. Metode Analisis Data	29
IV. GAMBARAN UMUM.....	34
A. Gambaran Umum Provinsi Lampung.....	34
B. Gambaran Umum Lampung Tengah	37
C. Gambaran Umum Tanggamus.....	42
D. Gambaran Umum Lampung Selatan	45
V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Analisis Potensi Sektor Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.....	49
1. Analisis Potensi Sektor Kabupaten Lampung Tengah.....	49
2. Analisis Potensi Sektor Kabupaten Tanggamus	55
3. Analisis Potensi Sektor Kabupaten Lampung Selatan.....	60
B. Identifikasi Perubahan Struktur Ekonomi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.....	67
1. Kabupaten Lampung Tengah.....	68
2. Kabupaten Tanggamus.....	72
3. Kabupaten Lampung Selatan	75
C. Perkembangan Pola Ruang dan Struktur Ruang Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.....	79
1. Pola Ruang	79
2. Struktur Ruang	89
VI. KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan.....	103
B. Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	105
LAMPIRAN.....	109

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Peta Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 2016-2035	3
2. Peta Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 2016-2035	4
3. Jaringan Internal dan Eksternal dalam Kluster Industri	9
4. Diagram Alir Pemikiran	26
5. Peta Administrasi Provinsi Lampung.....	35
6. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah.....	39
7. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus	43
8. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan	46
9. PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tengah Sebelum Penetapan WPPI (persen).....	51
10. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Tengah Sesudah Penetapan WPPI (persen).....	53
11. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tanggamus Sebelum Penetapan WPPI (persen)	57
12. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Tanggamus Sesudah Penetapan WPPI (persen)	59
13. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan Sebelum Penetapan WPPI (persen).....	63
14. Struktur PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Selatan Sesudah Penetapan WPPI (persen).....	65
15. Peta kawasan Industri Perda No 01 Tahun 2012 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	79
16. Peta Kawasan Industri Prov. Lampung Perda No 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	80
17. Peta Pola Ruang Kabupaten Lampung Tengah Perda No 01 Tahun 2012 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	81

18. Peta Pola Ruang Kabupaten Lampung Tengah Perda No 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	82
19. Peta Pola Ruang Kabupaten Tanggamus Perda No 01 Tahun 2010 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	84
20. Peta Pola Ruang Kabupaten Tanggamus Perda No 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	85
21. Peta Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan Perda No 01 Tahun 2012 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	86
22. Peta Pola Ruang Kabupaten Lampung Selatan Perda No 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	87
23. Peta Struktur Ruang Kabupaten Lampung Tengah Perda No 01 Tahun 2012 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	90
24. Peta Struktur Ruang Kabupaten Lampung Tengah Perda No 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	91
25. Peta Struktur Ruang Kabupaten Tanggamus Perda No 01 Tahun 2012 Tentang	
26. RTRW Prov. Lampung 2009-2029	93
27. Peta Struktur Ruang Kabupaten Tanggamus Perda No 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	95
28. Peta Struktur Ruang Kabupaten Lampung Selatan Perda No 01 Tahun 2012 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	96
29. Peta Struktur Ruang Kabupaten Lampung Selatan Perda No 12 Tahun 2019 Tentang RTRW Prov. Lampung 2009-2029	99

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Daftar Daerah yang Ditetapkan Sebagai WPPI.....	13
2. Penelitian Terdahulu.....	19
3. Kebutuhan Data.....	29
4. Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	30
5. Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.....	34
6. PDRB Provinsi Lampung 2019-2021.....	36
7. IKM yang Terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.....	37
8. Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah	38
9. PDRB ADHK Kabupaten Lampung Tengah 2018-2022 (Miliar Rupiah).....	40
10. Industri Unggulan di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah	41
11. Daftar Kecamatan di Kabupaten Tanggamus.....	42
12. PDRB ADHK Kabupaten Tanggamus 2018-2021.....	44
13. Industri Unggulan di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanggamus .	45
14. Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	46
15. PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2018-2021 (Miliar Rupiah).....	47
16. Industri Unggulan di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan	48
17. Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Lampung Tengah.....	49
18. Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Tanggamus.....	55
19. Sektor Basis dan Non Basis Kabupaten Lampung Selatan	61
20. Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Lampung Tengah Sebelum dan Sesudah Penetapan WPPI.....	68

21. Hasil Analisis Kuadran Shift Share Sebelum Penetapan WPPI Kabupaten Lampung Tengah (2010-2015).....	69
22. Hasil Analisis Kuadran Shift Share Sesudah Penetapan WPPI Kabupaten Lampung Tengah (2016-2022).....	70
23. Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Tanggamus Sebelum dan Sesudah Penetapan WPPI.....	72
24. Hasil Analisis Kuadran Shift Share Sebelum Penetapan WPPI Kabupaten Tanggamus (2010-2015)	73
25. Hasil Analisis Kuadran Shift Share Sesudah Penetapan WPPI Kabupaten Tanggamus (2016-2022)	74
26. Hasil Analisis Shift Share Kabupaten Lampung Selatan Sebelum dan Sesudah Penetapan WPPI.....	75
27. Hasil Analisis Kuadran Shift Share Sebelum Penetapan WPPI Kabupaten Lampung Selatan (2010-2015).....	76
28. Hasil Analisis Kuadran Shift Share Sesudah Penetapan WPPI Kabupaten Lampung Selatan(2016-2022).....	77
29. Perubahan Luasan Kawasan Industri Sebelum dan Sesudah Penetapan WPPI di Lima Kabupaten	88
30. Infrastruktur Industri dan Infrastruktur Penunjang Kawasan Industri Industri Kabupaten Lampung tengah, Tanggamus, Lampung Selatan.....	102

I. PENDAHULUAN

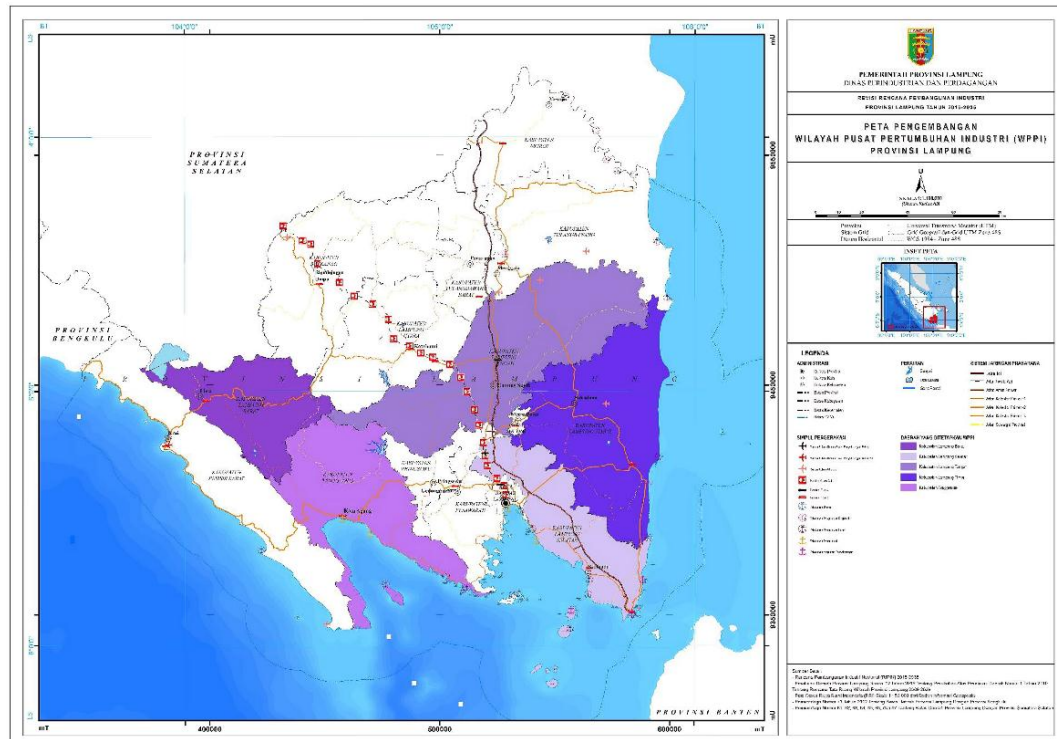
A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan pengembangan wilayah kerap kali ditemui di Indonesia sebagai suatu tantangan yang perlu dihadapi dalam hal kesenjangan wilayah dan pemerataan pembangunan. Sebagai upaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta mendorong pemerataan pembangunan di suatu wilayah yang banyak dilakukan oleh negara-negara saat ini yakni pengembangan sektor industri (Pramastya dan Rudiarto, 2020). Hal tersebut diperkuat oleh hasil penelitian dari Santoso (2021) dimana sektor industri dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan daerah. Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) nilai investasi di sektor industri tahun 2014 menyumbang sebesar Rp195 Triliun dimana nilai tersebut mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp202 Triliun. Penurunan nilai investasi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pengembangan industri nasional. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perindustrian menciptakan kebijakan percepatan pembangunan industri nasional yang tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) tahun 2015-2035. Pembangunan industri nasional berdasarkan RIPIN bertujuan mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional serta dapat mendorong pemerataan penyebaran pembangunan industri ke seluruh Indonesia khususnya ke luar Pulau Jawa sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional, peningkatan penyerapan tenaga kerja serta investasi. Namun dalam mewujudkan tujuan tersebut, menurut Zamaya dan Tampubolon (2021) perlunya memperhatikan dampak positif maupun negatif dari pertumbuhan industri tersebut. Meskipun pertumbuhan industri akan mampu membuka banyak kesempatan dalam lapangan pekerjaan, namun pertumbuhan industri tetap membutuhkan area untuk dapat beroperasi dan area strategis biasanya area pertanian (Zamaya dan Tampubolon 2021). Oleh karena itu,

pertumbuhan industri harus tetap memperhatikan sektor pertanian sebagai sektor penyedia pangan bagi kehidupan manusia (Rozaki,2020).

Pengembangan perwilayahan industri dilakukan melalui pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI), Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI), dan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) sebagai salah satu strategi dalam mencapai visi dan misi pembangunan industri nasional. WPPI berperan sebagai penggerak utama (prime mover) perekonomian di dalam WPI. Daerah yang memiliki kawasan industri dan telah didukung oleh industri pendorong utama (anchor industry) dapat ditetapkan sebagai WPPI. KPI merupakan lokasi kawasan industri yang diartikan sebagai bentang lahan dengan peruntukkan sebagai kegiatan industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) maupun Rencana Pembangunan Industri yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan. Terdapat 10 Wilayah Pengembangan Industri di Indonesia diantaranya 22 daerah-daerah yang ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) termasuk Provinsi Lampung.

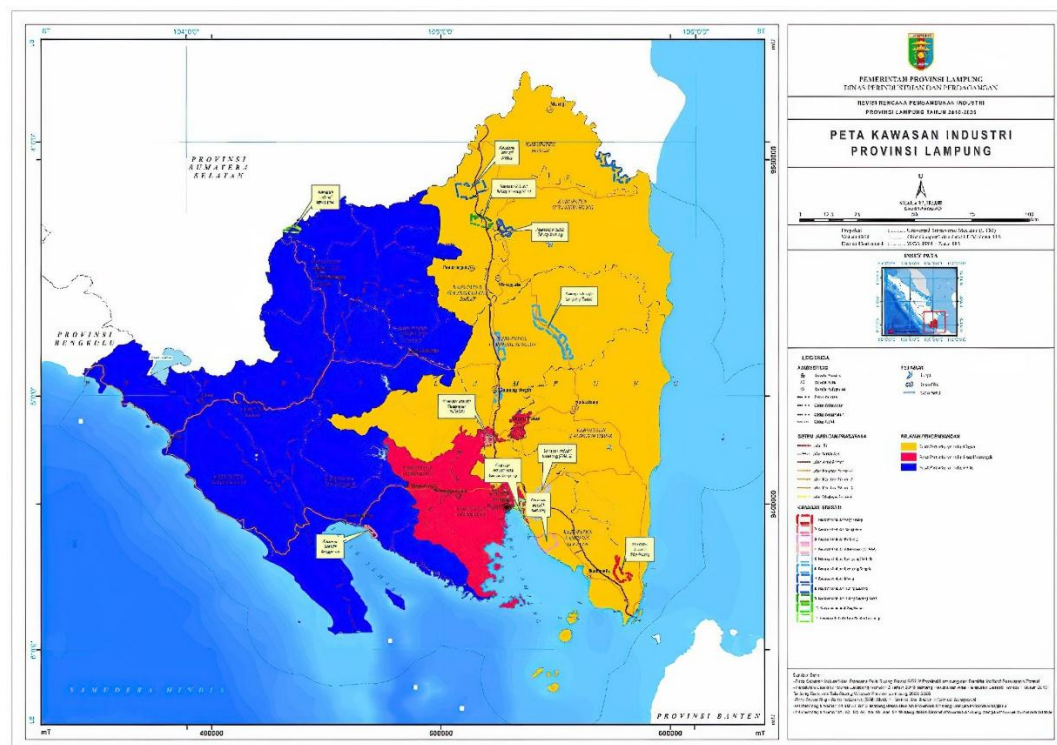
Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Provinsi Lampung berada pada posisi yang strategis sebagai pintu gerbang yang menghubungkan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Aksesibilitas untuk mencapai Provinsi Lampung dapat menggunakan jalur darat, laut dan udara dimana hal tersebut dapat menjadi faktor penunjang pengembangan wilayah industri. Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Selatan ditetapkan sebagai WPPI dengan Provinsi Lampung. Hal tersebut tertuang dalam Peta Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri berdasarkan Rencana Pengembangan Industri Provinsi Lampung 2016-2035..



Gambar 1. Peta Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 2016-2035
Sumber: RPIP Provinsi Lampung 2016-2035

Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPP) berada dibawah Kementerian Perindustrian, sedangkan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI), Kawasan Industri (KI) serta Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah (SIKIM) dilakukan oleh pemerintah daerah. Pemerintah Provinsi Lampung dalam Rencana Pengembangan Industri Provinsi Lampung (RPIP Lampung) merencanakan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang tersebar di 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung, 11 Kawasan Industri Prioritas, dan SIKIM dengan masing-masing daerah (kabupaten/kota) harus memiliki minimal satu. Dari 11 Kawasan Industri prioritas, 4 diantaranya masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yakni; KI Way Pisang, KI Tanggamus, KI Katibung, dan KI Pesawaran (KITARAN). Namun dalam kondisi eksisting lapangan belum adanya pengembangan industri di Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Barat sebagaimana kedua kabupaten tersebut masuk ke dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Hal tersebut terlihat dari belum adanya rencana pengembangan kawasan industri yang tertuang baik di RTRW Provinsi / RTRW

Kabupaten, Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi maupun peraturan terkait lainnya. Berdasarkan Rencana Induk Pengembangan Industri Provinsi Lampung, pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung selatan lebih berfokus pada industri berbasis agro (pertanian) sedangkan rencana pengembangan Kawasan Industri di Kabupaten Tanggamus berfokus pada industri perkapalan. Kawasan Industri yang di Provinsi Lampung berada di Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Lampung Utara dan Kabupaten Pesawaran sebagaimana tertuang dalam Peta Kawasan Industri Provinsi Lampung



Gambar 2. Peta Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri 2016-2035
Sumber: RPIP Provinsi Lampung 2016-2035

Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terintegrasi dengan peraturan-peraturan terkait lainnya, salah satunya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW memiliki peran dalam mewujudkan keterpaduan dan keselarasan dalam pembangunan suatu wilayah baik di tingkat nasional (RTRWN), tingkat provinsi

(RTRWP), hingga tingkat kabupaten/kota (RTRW Kabupaten / RTRW Kota). Provinsi Lampung memiliki RTRW Provinsi Lampung tahun 2009-2029 dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010. Tujuan penataan ruang wilayah Provinsi Lampung berdasarkan RTRW tersebut yakni “Terwujudnya keterpaduan Penataan Ruang Provinsi Lampung untuk mendukung Pembangunan yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing”. Seiring dengan adanya perubahan RTRW Provinsi Lampung dari sebelumnya Perda No 1 Tahun 2010 menjadi Perda no 12 Tahun 2019, tujuan penataan ruang di Provinsi Lampung juga mengalami perubahan. Berdasarkan RTRW perubahan tertuang tujuan penataan ruang Provinsi Lampung yaitu “Terwujudnya pembangunan wilayah yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan berbasis pengembangan industri, ketahanan pangan dan pariwisata menuju Provinsi Lampung berjaya”. Dalam RTRW setelah perubahan, pengembangan sektor industri juga masuk dalam fokus penataan ruang wilayah Provinsi Lampung. Perubahan RTRW Provinsi Lampung dilakukan sesudah adanya penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri pada tahun 2015.

Pengembangan sektor industri merepresentasikan amanah sila ke-5 pancasila sebagai dasar negara yakni “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai wujud pertumbuhan ekonomi dalam perencanaan ekonomi wilayah serta pemerataan pembangunan. Daerah yang menjadi pusat pertumbuhan sektor industri mempunyai pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan daerah lainnya (Santoso, 2021). Namun penetapan pusat pertumbuhan juga tetap harus memperhatikan keseimbangan alam untuk mencegah terjadinya degradasi lahan. Menurut Qiue et.al (2007) dalam Pramastya dan Rudiarto (2020) beberapa dampak dari adanya kebijakan penetapan wilayah industri dilihat dari aspek kewilayahan yakni pada perubahan dalam struktur ruang dan pola ruang suatu wilayah tersebut. Oleh karena itu, bagaimana struktur industri menyesuaikan dengan struktur ruang serta mengoordinasikan hubungan antara lahan industri dan lahan lainnya menjadi isu kunci yang harus diselesaikan (Pramastya dan Rudiarto, 2020). Selain itu, berkurangnya jumlah lahan pertanian akibat dari konversi lahan, timbulnya kemacetan, serta adanya penurunan kualitas hidup masyarakat merupakan dampak dari penetapan wilayah industri tersebut (Qiue et.al, 2007 dalam Pramastya dan Rudiarto, 2020). Konversi lahan telah terjadi secara masiv

hingga tahun 2017 akibat penetapan wilayah pusat pertumbuhan industri yang terjadi di wilayah sekitar lokasi (Pramastya dan Rudiarto, 2020).

Dalam penjabaran tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi penentuan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Lampung di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus dan Kabupaten Lampung Selatan. Pemilihan lokasi fokus penelitian didasari oleh kondisi eksisting lapangan dan rencana pengembangan industri yang telah tertuang dalam dokumen perencanaan terkait. Serta keluaran dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan seberapa besar implikasi penentuan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Lampung..

B. Rumusan Masalah

Provinsi Lampung berada pada posisi strategis dikarenakan terletak di ujung selatan Pulau Sumatera. Hal tersebut menjadikan Provinsi Lampung sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Selain itu, Provinsi Lampung memiliki potensi unggulan dari berbagai sektor yang dapat menjadi industri penggerak maupun industri utama dalam Pusat Pertumbuhan Wilayah Industri dan daerah sekitarnya. Terdapat lima kabupaten yang menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Lampung berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 yakni Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Selatan. Berdasarkan latar belakang masalah diatas rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana potensi masing-masing kabupaten yang telah ditetapkan menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Lampung menurut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029?
- 2) Bagaimana perubahan struktur ekonomi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung menurut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029?

- 3) Bagaimana perkembangan pola ruang dan struktur ruang di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung menurut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035 dan RTRW Provinsi Lampung 2009-2029?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai di dalam penelitian ini adalah

- 1) Untuk mengidentifikasi potensi masing-masing Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung
- 2) Untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung
- 3) Untuk menganalisis perkembangan pola ruang dan struktur ruang di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah serta pemangku kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat membantu sebagai acuan dalam pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Lampung.
- b. Bagi pihak swasta, diharapkan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan untuk berinvestasi dalam sektor industri untuk pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Lampung.
- c. Bagi peneliti lainnya, diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk penelitian selanjutnya.

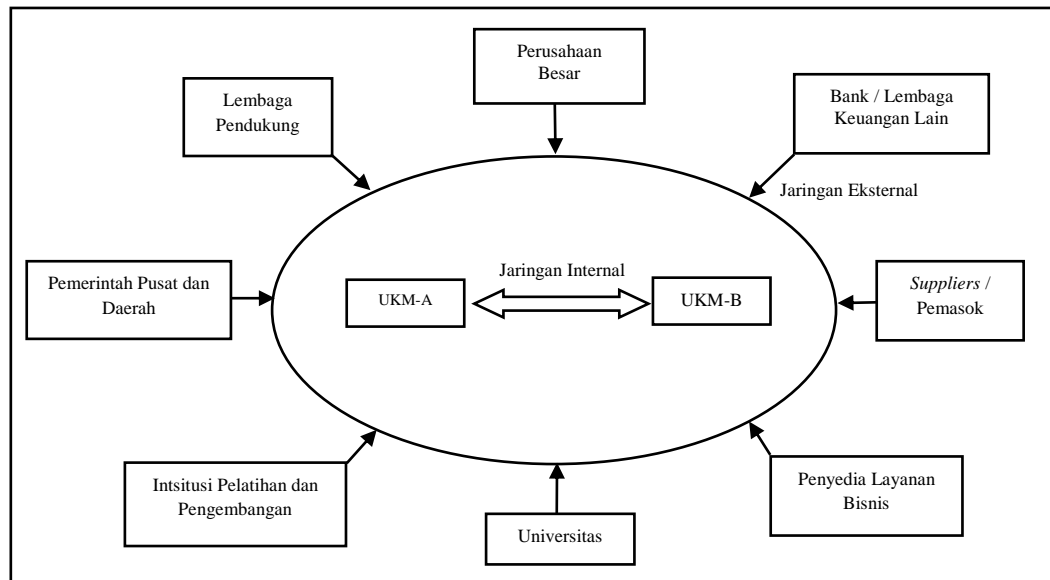
II. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

A. Teori Pertumbuhan Ekonomi yang digunakan dalam Pengembangan Wilayah

1. Teori Kluster Industri

Pengertian mengenai konsep kluster diperkenalkan oleh Michael E. Porter dalam tulisannya yaitu *Location, Competition, and Economic Development: Local Clusters in a Global Economy* (2000). Kluster Industri merupakan upaya pengelompokan industri inti yang saling berhubungan baik dengan industri pendukung (supporting industries), industri terkait (related industries), jasa penunjang, infrastruktur ekonomi, dan lembaga terkait (Ismail et.al, 2012). Pengertian Klaster (cluster) Industri menurut Deperindag, 2000 adalah suatu kelompok industri dengan focal/core industry yang saling berhubungan secara intensif dan membentuk partnership, baik dengan supporting industry maupun related industry. Keuntungan yang dihasilkan dari pembentukan klaster antara lain peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih besar, kemudahan dalam modal, akses kepada supplier, dan input pelayanan khusus serta terjadinya transfer informasi dan ilmu pengetahuan (Homer et.al, 2016). Pengembangan Klaster industri juga dapat meningkatkan daya saing daerah, hal ini diperkuat oleh pernyataan Lestari (2010) dimana klaster industri merupakan sebuah solusi untuk meningkatkan daya saing industri di daerah dengan adanya sejumlah perusahaan dan lembaga yang terkonsentrasi pada suatu wilayah serta saling terhubung dalam bidang khusus dan mendukung persaingan. Faktor yang paling penting di dalam kluster industri adalah adanya keterkaitan (linkage) antara perusahaan di dalam sektor tertentu atau dengan sektor-sektor lain tetapi saling mendukung (Sudjarmoko dan Wahyudi, 2011). Keterkaitan tersebut dapat berupa keterkaitan

secara vertikal maupun horizontal. Sehingga penekanan kluster industri berada pada adanya sekelompok industri yang berada di dalam suatu wilayah tertentu.



Gambar 3. Jaringan Internal dan Eksternal dalam Kluster Industri
Sumber: Tambunan, 2005

Berdasarkan Gambar 2, menjelaskan kerjasama antara perusahaan atau UKM terbagi ke dalam dua jenis jaringan internal dan jaringan eksternal. Dalam jaringan internal adanya kerjasama antar UKM secara horizontal. Sedangkan dalam jaringan eksternal terjadi kerjasama antara UKM dengan stakeholder terkait lain diantaranya; perusahaan besar, bank, pemasok, penyedia layanan bisnis, universitas, lembaga pelatihan dan pengembangan, pemerintah pusat dan daerah serta lembaga pendukung lainnya.

2. Teori Kutub Pertumbuhan

Teori Kutub Pertumbuhan pertama kali dicetuskan pada tahun 1955 oleh seorang ahli perencanaan wilayah berkebangsaan Prancis, Francois Perroux. Teori ini juga sering disebut dengan Teori Pusat Pertumbuhan atau Growth Pole Theory dan menjadi salah satu teori yang cukup dikenal dalam ilmu ekonomi regional. Menurut Hasan dan Aziz (2018), Teori Pusat Pertumbuhan merupakan salah satu

alat untuk mencapai tujuan pembangunan regional yang saling bertolak belakang, yaitu pertumbuhan dan pemerataan pembangunan ke seluruh pelosok daerah. Selain itu teori ini juga dapat menggabungkan antara kebijaksanaan dan program pembangunan wilayah dan perkotaan terpadu. Pusat pertumbuhan harus memiliki empat ciri, yaitu adanya hubungan intern antara berbagai macam kegiatan yang memiliki nilai ekonomi, adanya multiplier effect (unsur pengganda), adanya konsentrasi geografis, dan bersifat mendorong pertumbuhan daerah belakangnya (Tarigan, 2005).

Adapun inti dari Teori Kutub Pertumbuhan oleh Perroux menurut Arsyad (1999, dalam Darnilawati, 2018) antara lain;

- a. Kutub pertumbuhan itu muncul dengan adanya industri unggulan sebagai penggerak utama pembangunan suatu daerah.
- b. Pemusatan industri di suatu daerah akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan terciptanya pola konsumsi yang berbeda antar daerah.
- c. Daerah yang relatif maju atau aktif (daerah yang memiliki industri unggulan) akan mempengaruhi daerah-daerah yang relatif pasif (daerah yang memiliki industri yang tergantung dari industri unggulan/pusat pertumbuhan).

3. Teori Basis Ekonomi

Teori basis ekonomi pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 oleh ekonom Jerman, W. Sombart. Ia mendefinisikan kota sebagai sebagai fenomena ekonomi dan sebagai sebuah komunitas teritorial. Ia juga menjelaskan bahwa agar dapat berfungsi dengan baik dan berkembang secara dinamis, sebuah kota harus mengimpor makanan dan barang-barang lainnya dari luar.

Menurut Tarigan (2005), laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah ditentukan oleh besarnya peningkatan ekspor dari wilayah tersebut berdasarkan sektor basis/unggulan. Tarigan (2005) juga menjelaskan bahwa teori basis ekonomi mengklasifikasikan kegiatan produksi mejadi pekerjaan basis (dasar) dan pekerjaan servis (pelayanan). Pekerjaan servis biasa disebut juga dengan sektor

non basis. Dimana nantinya sektor basis/unggulan ini di jual/ekspor ke wilayah lainnya untuk meningkatkan perekonomian wilayah tersebut.

Menurut Saharuddin (2005) dalam Hutapea et al. (2020) Teori Basis Ekonomi terdapat dua sektor kegiatan, yaitu sektor basis ekonomi dan sektor nonbasis ekonomi. Sektor basis merupakan sektor yang memiliki potensi besar dalam menentukan pembangunan menyeluruh di daerah, sedangkan sektor nonbasis merupakan sektor penunjang dalam pembangunan menyeluruh tersebut (Hutapea et al., 2020). Selain itu, Hutapea et al. (2020) juga menjelaskan bahwa kegiatan basis merupakan kegiatan yang berorientasi ekspor barang dan jasa ke luar batas wilayah perekonomian yang bersangkutan karena sektor ini telah mencukupi kebutuhan di dalam wilayah tersebut. Kegiatan non basis adalah kegiatan menyediakan barang dan jasa yang di butuhkan oleh masyarakat yang berada di dalam batas wilayah perekonomian yang bersangkutan tanpa melakukan ekspor ke luar wilayah karena kemampuan sektor tersebut untuk mencukupi kebutuhan lokal masih terbatas.

B. Kebijakan Tata Ruang dalam Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri di Provinsi Lampung

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2020-2024)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 memuat visi Indonesia tahun 2045 salah satunya melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri sebagai salah satu strategi sektor ekonomi yang ditetapkan oleh presiden. Selain itu industrialisasi berbasis SDA dan rantai produksi global menjadi strategi yang akan dicapai dilihat dari kontribusi PDB industri pengolahan, kontribusi PDB industri pengolahan non migas, dan kontribusi tenaga kerja di sektor industri terhadap total pekerja. Kontribusi PDB industri pengolahan pada tahun 2018 sebesar 19,9% dan diharapkan dapat meningkat senilai 21% pada tahun 2024 mendatang. Kontribusi PDB industri pengolahan non Migas senilai 15,6% pada tahun 2018 dan diharapkan mampu meningkat sebesar 18,9% pada tahun 2024. Serta kontribusi tenaga kerja di sektor

industri terhadap total pekerja pada tahun 2018 sebesar 14,9% diharapkan menjadi 17,7% di tahun 2024.

Pengembangan Kawasan Industri (KI) diutamakan untuk KI di luar Pulau Jawa yang mencakup 9 KI prioritas yang difokuskan pada percepatan penyediaan sarana penunjang, fasilitasi perizinan, peningkatan investasi, revitalisasi pasca bencana, serta kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). Kesembilan KI prioritas yaitu: KI Sei Mangkei, KI Bintan Aerospace, KI Galang Batang, KI Sadai, KI Ketapang, KI Surya Borneo, KI Palu, KI Teluk Weda, dan KI Teluk Bintuni. Selain itu, terdapat 18 KI yang akan dikembangkan KI Ladong, KI Kuala Tanjung, KI Tanjung Buton, KI Tenayan, KI Kemingking, KI Tanjung Enim, KI Tanggamus, KI Pesawaran, KI Way Pisang, KI Katibung, KI Brebes, KI Madura, KI Sumbawa Barat, KI Batang, KI Jorong, KI Batulucun, KI Tanah Kuning, dan KI Takalar yang akan dikembangkan dalam kerangka industrialisasi dengan memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun, kerja sama regional, serta diversifikasi perekonomian daerah.

2. Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035 yang disusun oleh Kementerian Perindustrian merupakan suatu pedoman bagi pemerintah serta para pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri yang di dalamnya tertuang visi, misi, serta strategi pembangunan industri nasional. Dalam satu strategi guna mencapai visi misi pembangunan industri nasional salah satunya mengembangkan Wilayah Pusat pertumbuhan Industri (WPPI).

Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) dalam RIPIN dijelaskan fungsinya sebagaimana sebagai penggerak utama dalam sektor ekonomi di dalam Wilayah Pengembangan Industri (WPI). Dalam penyusunan WPPI, terdapat beberapa kriteria yang digunakan diantaranya: (a) potensi sumber daya alam (agro, mineral, migas); (b) ketersediaan infrastruktur transportasi; (c) kebijakan afirmatif untuk pengembangan industri ke luar Pulau Jawa; (d) penguatan dan pendalaman rantai nilai; (e) kualitas dan kuantitas SDM; f. memiliki potensi

energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air); (g) memiliki potensi sumber daya air industri; (h) memiliki potensi dalam perwujudan industri hijau; dan (i) kesiapan jaringan pemanfaatan teknologi dan inovasi.

Tabel 1. Daftar Daerah yang Ditetapkan Sebagai WPPI

No	Lokasi Kabupaten/Kota	Provinsi
1	Mimika	Papua
2	Teluk Bintuni	Papua Barat
3	Hatnahera Timur-HalmaheraTengah - Pulau Morotai	Maluku Utara
4	Bitung-Manado-Tomohon-Minahasa-Minahasa Utara (termasuk KAPET MANA DO BITUNG)	Sulawesi Utara
5	Palu-Donggala-Parigi Mountong-Sigi (termasuk KAPET PALAPAS)	Sulawesi Tengah
6	Kendari-Konawe-Konawe Utara-Konawe Selatan-Kolaka-Morowali (termasuk KAPET BANK SEJAHTERA SULTRAJ)	Sulawesi Tenggara
7	Makassar-Maros-Gowa - Takalar-Jeneponto-Bantaeng	Sulawesi Selatan
8	Pontianak-Landak-Sanggau-Ketapang-Sambas-Bengkayang (sebagian KAPET Khatulistiwa)	Kalimantan Barat
9	Tanah Bumbu-Kotabaru (termasuk KAPET BATULICINJ)	Kalimantan Selatan
10	Samarinda, Balikpapan, dan Kutai Kertanegara-Bontang-Kutai Timur (termasuk KAPET SASAMBA)	Kalimantan Timur
11	Tarakan -Nunukan	Kalimantan Utara
12	Banda Aceh, Aceh Besar dan Pidie -Bireun-Lhokseumawe (termasuk KAPET BANDAR ACEH DARUSSALAM)	Nanggroe Aceh Darussalam
13	Medan-Binjai-Deli Serdang-Serdang Bedagai - Karo-Simalungun-Batubara	Sumatera Utara
14	Dumai-Bengkalis-Siak	Riau
15	Batam-Bintan	Kep.Riau
16	Banyuasin-Muara Enim	Sumatera Selatan
17	Lampung Barat-Lampung Timur-Lampung Tengah-Tanggamus-Lampung Selatan	Lampung
18	Kendal-Semarang-Demak	Jawa Tengah
19	Tuban-Lamongan-Gresik-Surabaya-Sidoarjo-Mojokerto-Bangkalan	Jawa Timur
20	Cilegon-Serang-Tangerang	Banten
21	Cirebon-Indramayu-Majalengka	Jawa Barat
22	Bogor-Bekasi-Purwakarta-Subang-Karawang	Jawa Barat

Sumber: RIPIN 2015-2035

Terdapat 22 provinsi yang mana masing-masing provinsi tersebut memiliki lokasi yang ditetapkan sebagai Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung masuk kedalam salah satu provinsi dalam pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Wilayah Industri dengan lokasi pengembangan berada di Kabupaten Lampung Barat, Lampung Timur, Lampung Tengah, Tanggamus dan Lampung Selatan. Lokasi Kabupaten/Kota yang ditetapkan sebagai WPPI di Provinsi Lampung dalam dilihat dalam tabel beriku;

3. Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035

A. Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi

Uraian Visi dan Misi Pembangunan Industri Provinsi Lampung mengacu dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019. Visi pembangunan industri Provinsi Lampung tahun 2015-2035, yaitu:

***“Terwujudnya Industri Sebagai Penggerak Utama Perekonomian dan
Pemerataan Pembangunan Provinsi Lampung”***

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, pembangunan industri Provinsi Lampung mengembang Misi sebagai berikut:

1. Mengembangkan sumber daya industri yang berkualitas, berdaya saing, professional, dan berkelanjutan guna mendukung sektor industri daerah
2. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya komoditas unggulan daerah yang dapat meningkatkan lapangan usaha dan pendapatan daerah
3. Memperkuat struktur industri guna mewujudkan iklim industri daerah yang kondusif
4. Meningkatkan pengembangan industri kecil dan menengah dalam rangka penguatan perekonomian rakyat.

B. Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Lampung

Tujuan Pembangunan Industri Provinsi Lampung Tahun 2016-2035 adalah:

1. Meningkatkan peranan dan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung;
2. Meningkatkan kekuatan pasar dalam dan luar negeri serta mengurangi ketergantungan terhadap impor;
3. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal pada sektor industri;
4. Menumbuhkembangkan arus investasi sektor industri daerah;
5. Mendorong tumbuhnya industri-industri baru berdasarkan komoditas unggulan daerah; dan
6. Meningkatkan peran dan fungsi sektor industri sebagai Multiplier effect yang mampu menggerakkan sektor-sektor lainnya.

C. Strategi Pembangunan Industri Provinsi Lampung

Strategi pembangunan industri Provinsi Lampung sebagai berikut:

1. Penguatan kompetensi SDM industri, kelembagaan pelaku usaha dan konektivitas pada struktur industri antar satuan unit usaha;
2. Penguatan sarana dan prasarana kerja dan integrasi sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelayanan administrasi urusan perindustrian;
3. Penguatan pada kontinuitas bahan baku dengan memastikan pasokan bahan baku yang berkualitas tinggi dan berkelanjutan,
4. Penguatan diversifikasi produk yang bersumber pada komoditas unggulan daerah
5. Meningkatkan kontribusi industri kecil dan menengah terhadap produk domestic regional sektor industri;
6. Meningkatkan daya saing industri kecil, menengah dan besar yang berorientasi ekspor.

D. Program Pembangunan Industri

Program Pengembangan Industri di Provinsi Lampung melalui pengembangan perwilayahan industri meliputi;

1. Pengembangan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
2. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
3. Pembangunan Kawasan Industri
4. Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

4. Permen ATR/ BPN RI No. 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota

Penelitian ini memiliki cakupan wilayah penelitian berupa wilayah kabupaten. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan Basis Data Dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota, Serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, peta dasar kabupaten harus memiliki skala minimal 1 : 50.000 dengan unit pemetaan yang dapat digunakan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten. Atribut Pera RTRW KAbupaten meliputi atribut peta rencana struktur ruang kabupaten, rencana pila ruang kabupoaten dan penetapan kawasan strategis kabupaten.

C. Konsep Pola Ruang dan Struktur Ruang

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, tata ruang merupakan wujud dari struktur ruang dan pola ruang. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya. Sedangkan Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan

sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

1. Pola Ruang

Pola Ruang terbentuk dari interaksi antar masyarakat ditunjukkan oleh tiga masam struktur dasar yakni linier, loop, dan kipas/cabang (Dovey, 1990 dalam Soamole, 2011). Dapaun muatan pola ruang menurut Tata Ruang Wilayah diantaranya:

- a. Kawasan Lindung
- b. Kawasan Budidaya

2. Struktur Ruang

Struktur ruang wilayah merupakan gambaran sistem pusat pelayanan kegiatan internal dan jaringan infrastruktur sampai akhir masa perencanaan, yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah dan melayani fungsi kegiatan yang ada/direncanakan dalam wilayah (Lahagina, 2015). Menurut Nia K. Pontoh & Iwan Setiawan (2008) dalam Lahagina (2015), unsur pembentuk struktur tata ruang kota terdiri dari pusat kegiatan, kawasan fungsional, dan jaringan jalan. Kota atau kawasan perkotaan pada dasarnya dapat dipandang sebagai suatu sistem spasial, yang secara internal mempunyai unsur-unsur yang menjadi pembentuknya serta keterkaitannya satu sama lain. Adapun muatan struktur ruang dalam rencana Tata Ruang meliputi:

- a. Sistem Perkotaan Pusat Permukiman.
 - 1) Sistem Wilayah
 - 2) Sistem Internal Perkotaan
- b. Sistem Jaringan Prasarana;
 - 1) Transportasi;
 - 2) Sistem Jaringan Energi
 - 3) Sistem Jaringan Telekomunikasi
 - 4) Sistem Jaringan Sumber Daya Air
 - 5) Sistem Jaringan Persampahan dan Sanitasi
 - 6) Sistem Jaringan Prasarana lainnya

Beberapa teori yang melandasi struktur ruang kota (Lahagina, 2015) diantaranya:

1. Teori Konsentris (Burgess,1925) yang menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau Central Bussiness District (CBD) adalah pusat kota yang letaknya tepat di tengah kota dan berbentuk bundar yang merupakan pusat kehidupan sosial, ekonomi, budaya dan politik, serta merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi dalam suatu kota.
2. Teori Sektoral (Hoyt,1939) menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau Central Bussiness District (CBD) memiliki pengertian yang sama dengan yang diungkapkan oleh Teori Konsentris.
3. Teori Pusat Berganda (Harris dan Ullman,1945) menyatakan bahwa Daerah Pusat Kota (DPK) atau Central Bussiness District (CBD) adalah pusat kota yang letaknya relatif di tengah-tengah sel-sel lainnya dan berfungsi sebagai salah satu “growing points”.Teori lainnya yang mendasari struktur ruang kota adalah Teori Ketinggian Bangunan; Teori Konsektoral; dan Teori Historis.
4. Teori Ketinggian Bangunan (Bergel, 1955) menyatakan bahwa perkembangan struktur kota dapat dilihat dari variabel ketinggian bangunan. DPK atau CBD secara garis besar merupakan daerah dengan harga lahan yang tinggi.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berisikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dalam meninjau keaslian penelitian ini. Terdapat perbedaan kriteria dalam hal waktu, lokasi, tujuan, variable penelitian yang digunakan, namun memiliki kesamaan dalam segi tema penelitian dan metodologi yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan terkait implikasi penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri terhadap pengembangan wilayah di Provinsi Lampung.

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
1.	Lukman Nuzul Hakim, Andreas Suhendi	Analisis Location Quotion versus Sumbangan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto dalam Penentuan Kawasan Ekonomi Basis di Provinsi Lampung	Menentukan Kawasan Basis dan Kawasan Non Basis perekonomian di Provinsi Lampung	<i>Location Quotient (LQ)</i>	Provinsi Lampung memiliki 4 kawasan ekonomi unggulan teratas (Primadona) yaitu kawasan Pertanian, Kehutanan, Perikanan dan memberikan kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Lampung yang tertinggi yaitu 29,88% (2015-2019).
2.	Dwi Mahroji, Mei Indrawati (2019)	Analisis Sektor Unggulan dan Spesialisasi Regional Kota Bandar Lampung	Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dan spesialisasi regional di Kota Bandar Lampung	<i>Location Quotient (LQ)</i>	Terdapat tujuh sektor basis antara lain sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor bangunan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan/komunikasi, sektor bank dan lembaga keuangan lainnya, dan sektor jasa-jasa.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
3.	Andre Gunawan	Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Non Migas di Provinsi Lampung Periode 2014-2020	Mengetahui potensi dari subsektor industri pengolahan non migas yang akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi sektor industri pengolahan non migas di Provinsi Lampung (2014-2020).	<i>Location Quotient (LQ)</i>	Terdapat empat industri pengolahan non migas basis yaitu industri karet barang dari karet dan plastik, industri makanan dan minuman, industri barang galian bukan logam, dan industri mesin dan perlengkapan. Dan empat industri yang potensial untuk dikembangkan menjadi sektor basis yaitu industri kertas barang dari kertas percetakan dan reproduksi media rekaman, industri alat angkutan, industri logam dasar, dan industri barang logam komputer barang elektronik optik dan peralatan listrik
4.	Yanuar Pribadi, Nurbiyanto	Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient dan Shift-Share analysis	Mengidentifikasi sektor ekonomi yang menjadi basis daya saing ekonomi Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung.	<i>Location Quotient (LQ)</i> dan <i>Shift Share (SS)</i>	Sektor basis perekonomian Kabupaten Lampung Tengah yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Konstruksi, serta Industri Pengolahan. Terdapat dua sektor ekonomi yang tumbuh cepat dan memiliki daya saing pada periode 2016-2020 yaitu Transportasi dan Pergudangan serta Informasi dan Komunikasi.
5.	Byron A. Salindeho, Debby Christina Rotinsulu, Jacline I. Sumual (2023)	Analisis Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 –2021	Mengetahui dan menganalisis perubahan struktur ekonomi serta sektor yang menjadi penggerak utama Perekonomian di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2017 sampai tahun 2021	<i>Location Quotient (LQ)</i> dan <i>Shift Share (SS)</i>	Provinsi Sulawesi Utara dari 17 sektor terdapat 7 sektor unggulan atau sektor basis yaitu sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, sektor Konstruksi, sektor Informasi dan Komunikasi, sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
6.	Faujatul Hasanah , Iwan Setiawan, Trisna Insan Noor, Eka Purna Yudha (2021)	Analisis Potensi Sektor Unggulan Dan Perubahan Struktur Ekonomi Di Kabupaten Serang Provinsi Banten	Mengidentifikasi sektor-sektor unggulan dan menganalisis pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Serang periode 2015-2019. A	<i>Location Quotient (LQ)</i> dan <i>Shift Share (SS)</i>	Empat sektor yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Serang, yaitu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; sektor industri pengolahan; sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib; serta sektor jasa pendidikan. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan merupakan sektor unggulan namun memiliki pertumbuhan yang lambat dan daya saing yang rendah. Sektor industri pengolahan memiliki pertumbuhan yang lambat, namun merupakan sektor unggulan dan memiliki daya saing tinggi.
7.	Iman Sungkawa, Umi Trisnaningsih, dan Siti Millatul Maula Mahmuda (2018)	Analisis Location Quotient (LQ) Potensi Wilayah Kecamatan Berbasis Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon	Mengetahui komoditas unggulan dan potensi wilayah basis pada sektor pertanian di setiap kecamatan Kabupaten Cirebon.	<i>Location Quotient (LQ)</i>	Terdapat 10 komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon yaitu: padi, jagung, kacang hijau, ubi jalar, mangga, pisang, nangka, bawang merah, cabe besar, dan terung.
8.	Hendrianto Sundaro, Agus Sarwo Edy Sudrajat (2019)	Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah	Mengetahui sektor unggulan di Kota Semarang	<i>Location Quotient (LQ)</i>	Terdapat 11 sektor perkeonomian di Kota Semarang yang merupakan sektor basis (unggulan) dengan nilai LQ tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi dengan nilai LQ sebesar 2,815 sedangkan sektor basis dengan nilai LQ terendah (1,04) adalah adalah sektor penyediaan, akomodasi dan makan minum.

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
9.	Rafi Mahaesa dan Syamsul Huda (2021)	Potensi Sektor Unggulan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto	Menelaah sektor kunci Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto.	<i>Location Quotient (LQ)</i>	Sektor unggulan Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Mojokerto ialah sektor industri pengolahan
10.	Sofiani Nalwin Nurbani (2019)	Analisa Potensi Industri Berdasarkan Pada Sumber Daya Alam di WPPI Sulawesi Tenggara	Mengetahui potensi sumber SDA di wilayah WPPI Sulawesi Tenggara yang memiliki potensi pendirian industri baru atau pengembangan industri yang telah ada.	<i>Location Quotient (LQ)</i>	Potensi komoditi perkebunan yang paling besar di Wilayah WPPI Sulawesi Tenggara adalah Komoditi Kakao sebesar 39,79 % dari luas total perkebunan seluas 304.410 hektar.
11.	Hans Sammy Marthin Salakory, Febby Sonya Matulesy (2020)	Analisis Shift – Share Terhadap Perekonomian Kota Sorong	Menganalisis pertumbuhan sektor-sektor ekonomi, daya saing perekonomian di Kota Sorong dengan PDRB (2013-2018)	<i>Shift-Share (SS)</i>	Sektor-sektor ekonomi dengan pertumbuhan yang lamban yaitu sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, serta sektor Industri Pengolahan. Sektor Pertambangan dan Penggalian memiliki daya saing. Sektor-sektor dengan pertumbuhan yang progresif hanya enam sektor dan sebelas sektor yang memiliki pertumbuhan yang lamban.
12.	Ken Martina Kasikoen (2018)	Analisis Shift Share Untuk Perencanaan Wilayah (Studi Kasus – Kabupaten Bogor)	Mengetahui perubahan sektor ekonomi di Kabupaten Bogor tahun 2013 dan 2016.	<i>Shift-Share (SS)</i>	Terjadi pergeseran yang signifikan sektor unggulan di Kabupaten Bogor, dan sektor-sektor ekonomi yang mendukung wilayah Kabupaten Bogor sebagai wilayah penyangga, seperti sektor pertanian, mengalami penurunan.
13.	Zakaria, T. Zulham, Eddy Gunawan	Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Besar	Mengetahui terjadinya pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten	<i>Shift-Share (SS)</i>	Terjadi perubahan struktur ekonomi di Kabupaten Aceh Besar dari sektor primer ke sektor sekunder berdasarkan peranan sektor sekunder yang terus meningkat melalui besarnya

No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
	(2018)		Aceh		kontribusi terhadap PDRB kabupaten Aceh Besar
14.	Dimas Dwi Pratikno , Cynthia Dikna Sari (2021)	Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perubahan Struktur Perekonomian Provinsi Lampung	Menganalisis pergeseran struktur perekonomian sebagai dampak Pandemi Covid-19 di Provinsi Lampung	<i>Shift-Share</i> (SS)	Terjadi peningkatan di seluruh sektor dengan sektor industri pengolahan mengalami pertumbuhan yang lebih besar, dibanding dengan sektor lain.
15.	Albi Paramasatya dan Iwan Rudiarto (2019)	Implikasi Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Terhadap Penggunaan Lahan di Kabupaten Majalengka	Mengkaji implikasi penetapan wilayah pusat pertumbuhan industri terhadap perubahan penggunaan lahan.	<i>Analisis Overlay (Georeferencing)</i>	Penetapan wilayah pusat pertumbuhan industri berimplikasi terhadap perubahan penggunaan lahan berupa konversi lahan yang cukup besa
16.	Rizqy Ridho Prakasa, Tiasa dan Adimagistra, Wahjoerini (2020)	Kajian Perkembangan Struktur dan Pola Ruang Permukiman Kecamatan Banyumanik	Mengkaji perkembangan penggunaan lahan permukiman dan struktur ruang Kecamatan Banyumanik	Overlay peta.	Penggunaan lahan permukiman berkembang pesat terjadi di tahun 2009 hingga 2019. Peningkatan harga lahan terjadi di setiap kelurahan di Kecamatan Banyumanik. Dampak perkembangan penggunaan lahan permukiman membentuk pola perkembangan linier bersifat radial.
17.	Yohanes Christian, Chay Asdak, Dwi Rustam Kendarto (2021)	Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung Barat	Mengetahui pola perubahan penggunaan lahan	Overlay peta.	Perubahan tataguna lahan di Kabupaten Bandung Barat berbentuk hutan, perkebunan, pertanian lahan kering dan basah, serta lahan terbangun seluas 11.000 ha

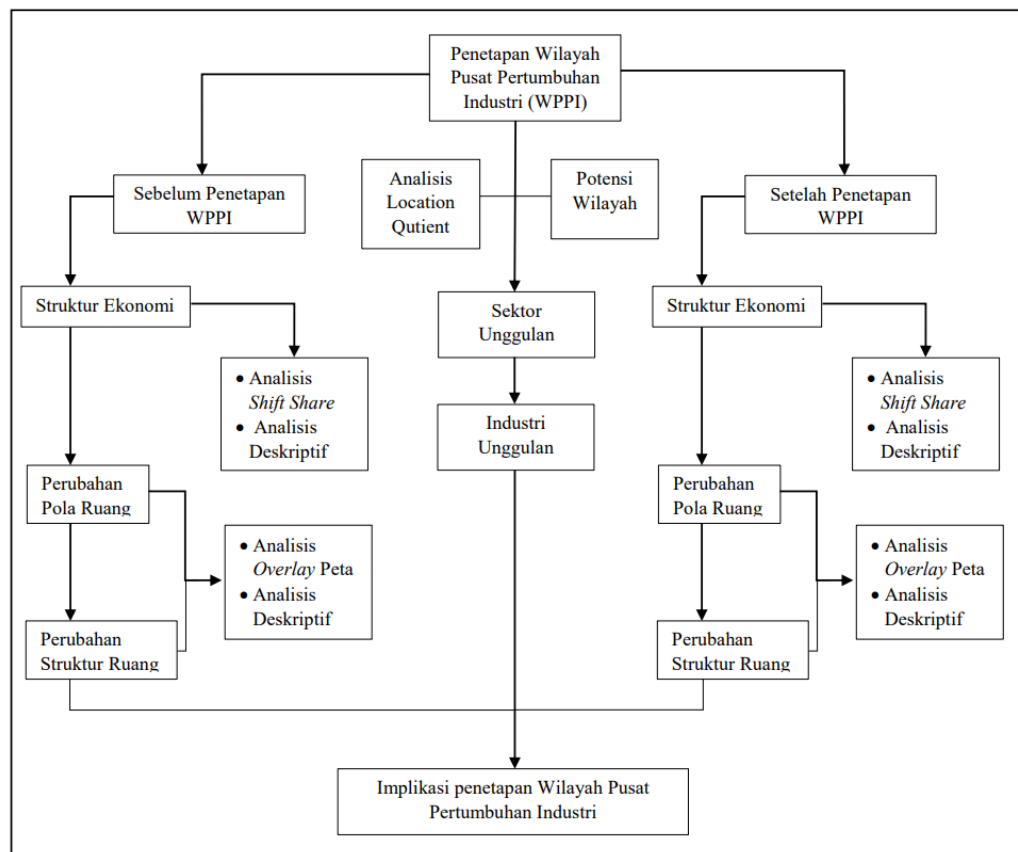
No	Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan	Metode Analisis	Hasil
18.	Adysahwan, Syafri, Syahriar Tato (2022)	Tipologi dan Perubahan Pemanfaatan Ruang (Studi Kasus Kabupaten Sinjai)	Menganalisis perubahan penggunaan ruang di Kabupaten Sinjai	<i>Overlay</i> data citra	Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Sinjai pada periode 2012-2032 didominasi oleh bertambahnya lahan terbangun, tambak dan sawah dan diikuti dengan berkurangnya luasan hutan, perkebunan, dan semak belukar
19.	Fitrian Adiyaksa, Prijono Nugroho Djojomartono (2020)	Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri di Kabupaten Kendal Tahun 2014 - 2018	Mengevaluasi kesesuaian alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan industri di Kabupaten Kendal (2014-2018 terhadap (RTRW) Kabupaten Kendal tahun 2011-2031	<i>Overlay</i> peta	Kesesuaian alih fungsi lahan pertanian menjadi industri di Kabupaten Kendal dari tahun 2014 s.d. 2018 sebagian besar telah sesuai dengan RTRW. Dengan rincian sebanyak 91,18 % izin lokasi industri dan 62 % IPPT pertanian menjadi industri telah sesuai dengan RTRW Kabupaten Kendal tahun 2011 s.d. 2031
20.	Muhammad Ridwan A Latief, Roland A. Barkey, Muh. Iqbal Suhaeb (2021)	Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Banjir di Kawasan Daerah Aliran Sungai Maros	Mengetahui kondisi penggunaan lahan terbangun serta perubahannya dalam kurung waktu 5 tahun terakhir di kawasan Daerah Aliran Sungai Maros	<i>Overlay</i> peta	Perubahan penggunaan lahan terbangun pada kawasan daerah aliran sungai Maros mengalami peningkatan yang cukup tinggi, dimana lahan kebun yang berubah menjadi permukiman sebesar 18,4 ha. Sedangkan sawah yang berubah menjadi permukiman sebesar 3,68 ha dari tahun 2015 ke tahun 2019

Sumber: Sintesa Penulis, 2024

E. Kerangka Pemikiran

Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dilakukan di bawah naungan Kementerian Perindustrian sebagai salah satu usaha percepatan pemerataan sektor industri baik di Pulau Jawa hingga di luar Pulau Jawa. Hal tersebut tertuang di dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN). Kementerian Perindustrian telah menetapkan 22 wilayah yang menjadi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri. Terdapat lima kabupaten di Provinsi Lampung yang termasuk ke dalam WPPI diantaranya Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten Lampung Timur, Kabupaten Lampung Tengah, Tanggamus, Kabupaten Lampung Selatan. Namun berdasarkan sumber data kajian awal yang didapat dari instansi terkait diantaranya; RTRW Provinsi Lampung (Perda No 1 Thn 2010) dan RTRW Provinsi Lampung (Perda No 12 Thn 2019) dan Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung, hanya tiga kabupaten yang memiliki kawasan industri baik secara eksisting maupun rencana. Sehingga penelitian mengambil lokasi di tiga kabupaten tersebut diantaranya Kabupaten Lampung tengah, Tanggamus, dan Lampung Selatan.

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder. Kebutuhan data penelitian ini diantaranya; RTRW Provinsi Lampung (Perda No 1 Thn 2010) dan RTRW Provinsi Lampung (Perda No 12 Thn 2019), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional, Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi Lampung, PDRB masing-masing kabupaten Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, PDRB Provinsi Lampung, dan SHP Peta Pola Ruang dan Peta Struktur Ruang Provinsi Lampung. Dalam menganalisis adanya perubahan struktural dari penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri menggunakan Analisis *Location Quotient*, Analisis statistik deskriptif, analisis *Shift Share*, dan analisis spasial menggunakan ArcGIS. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan terhadap hasil analisis serta saran. Lebih lanjut terkait kerangka pemikiran digambarkan dalam diagram alur berikut:



Gambar 4. Diagram Alir Pemikiran

Sumber: Peneliti, 2024

III. METODE PENELITIAN

A. Konsep Dasar dan Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan metode dan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif diartikan penelitian dengan mendeskripsikan suatu karakteristik serta menjawab persoalan dari adanya fenomena maupun peristiwa yang terjadi. Output dari penelitian deskriptif ini nantinya berupa deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta serta keterkaitan antar fenomena yang sedang diteliti.

Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai obyek penelitian dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi variabel masing-masing. Syarat mutlak yang harus terpenuhi didalam penelitian kuantitatif yaitu realibilitas dan validitas. Dimana dua syarat tersebut yang nantinya akan menentukan kualitas hasil penelitian kedepannya. Penelitian kuantitatif menggunakan analisis statistik. Berdasarkan hal-hal tersebut maka penelitian ini disebut penelitian deskriptif kuantitatif.

- a. Industri adalah usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan
- b. Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri yang telah memiliki Izin Usaha Kawasan Industri
- c. Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri adalah wilayah yang dirancang dengan pola berbasis pengembangan industri dengan pendayagunaan potensi sumberdaya wilayah melalui penguatan infrastruktur industri dan konektivitas yang memiliki keterkaitan ekonomi kuat dengan wilayah di sekitarnya.

- d. Pengembangan Wilayah merupakan suatu kegiatan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada di suatu wilayah yang dimanfaatkan guna meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah tersebut.
- e. Analisis *Shift Share* adalah metode analisis untuk mengetahui struktur perekonomian pada suatu wilayah, pergeseran sektor-sektor unggulan pada dua kurun waktu, dan mengetahui posisi sektor perekonomian suatu wilayah terhadap wilayah yang lebih luas.
- f. Analisis *Location Quotient* adalah analisis yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana tingkat spesialisasi sektor-sektor ekonomi di suatu wilayah yang memanfaatkan sektor basis atau leading sector
- g. Implikasi Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri adalah perbandingan kondisi di masing-masing kabupaten sebelum dan sesudah penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri
- h. Variable terikat (*dependent variable*) merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variable bebas. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri.
- i. Variable bebas (*independent variable*) adalah variable yang mempengaruhi variabel terikat. Dalam penelitian ini yang menjadi variable bebas adalah PDRB Provinsi Lampung, PDRB Kabupaten Lampung Timur, PDRB Kabupaten Lampung Barat, PDRB Kabupaten Lampung Tengah, PDRB Kabupaten Tanggamus, PDRB Kabupaten Lampung Selatan, dan RTRW Provinsi Lampung.

B. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder data sekunder. Data dikumpulkan dari hasil observasi dan seluruh hasil kajian studi literature yakni jurnal-jurnal penelitian yang terkait serta bersumber dari buku. Penelitian dengan jenis data sekunder juga didapatkan dari instansi terkait seperti Badan Pusat Statistik (BPS) serta instansi terkait lainnya baik instansi pemerintah maupun non pemerintah. Berikut dijelaskan jenis data dan sumber data yang dibutuhkan penelitian ini di dalam tabel kebutuhan data dibawah berdasarkan masing-masing tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

Tabel 3. Kebutuhan Data

No	Tujuan Penelitian	Nama Data	Sumber Data	Jenis Data
1.	Mengidentifikasi potensi masing-masing Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung	PDRB ADHK Indonesia (2010-2022) PDRB ADHK Provinsi Lampung (2010-2022) PDRB ADHK dan ADHB Kabupaten, Lampung Tengah, Tanggamus dan Lampung Selatan(2010-2022)	Data berasal dari kajian literature dan data instansi	Data Primer dan data sekunder
2.	Menganalisis perubahan struktur ekonomi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung	PDRB ADHK Provinsi Lampung (2010-2022) PDRB ADHK Kabupaten, Lampung Tengah, Tanggamus dan Lampung Selatan (2010-2022)	Data berasal dari kajian literature dan data instansi	Data Primer dan data sekunder
3.	Menganalisis perkembangan pola ruang dan struktur ruang di sektor industri Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung	RTRW Provinsi Lampung (Perda No 1 Thn 2010) RTRW Provinsi Lampung (Perda No 12 Thn 2019)	Data berasal dari kajian literature dan data instansi	Data Primer dan data sekunder

Sumber: Peneliti, 2024

C. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode analisis *Location Quotient* (LQ) digunakan dalam mengidentifikasi potensi masing-masing Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung; metode analisis *Shift Share* (SS) digunakan dalam mengidentifikasi perubahan struktur ekonomi wilayah; serta analisis *overlay* peta digunakan dalam mengidentifikasi perubahan struktur dan pola ruang wilayah.

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan dari penelitian dijelaskan dalam tabel berikut;

Tabel 4. Metode Pengolahan dan Analisis Data

No	Tujuan Penelitian	Nama Data	Metode Analisis Data
1.	Mengidentifikasi potensi masing-masing Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung	PDRB ADHK Indonesia (2010-2022) PDRB ADHK Provinsi Lampung (2010-2022) PDRB ADHK dan ADHB Lampung Tengah, Tanggamus dan Lampung Selatan (2010-2022)	Analisis <i>Location Quotient</i> , statistik deskriptif
2.	Menganalisis perubahan struktur ekonomi Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung	PDRB ADHK Provinsi Lampung (2010-2022) PDRB ADHK dan ADHB, Lampung Tengah, Tanggamus dan Lampung Selatan (2010-2022)	Analisis Deskriptif dan Analisis <i>Shift Share</i>
3.	Menganalisis perkembangan pola ruang dan struktur ruang di sektor industri Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung	RTRW Provinsi Lampung (Perda No 1 Thn 2010) RTRW Provinsi Lampung (Perda No 12 Thn 2019)	Analisis Deskriptif dan <i>Overlay</i> peta

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti, 2023

1. Metode analisis tujuan pertama

Metode analisis data yang digunakan dalam menjawab tujuan pertama yakni analisis statistik deskriptif. Analisis dan perhitungan di dalam tujuan pertama menggunakan perhitungan *Microsoft Excel*. Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Muhson, 2006).

Teknik analisis statistik deskriptif yang dapat digunakan antara lain (Muhson, 2006):

- a. Penyajian data dalam bentuk tabel atau distribusi frekuensi dan tabulasi silang (crosstab). Dengan analisis ini akan diketahui kecenderungan hasil temuan penelitian, apakah masuk dalam kategori rendah, sedang atau tinggi.
- b. Penyajian data dalam bentuk visual seperti histogram, poligon, ogive, diagram batang, diagram lingkaran, diagram pastel (pie chart), dan diagram lambang. Penghitungan ukuran tendensi sentral (mean, median modus).
- c. Penghitungan ukuran letak (kuartil, desil, dan persentil).
- d. Penghitungan ukuran penyebaran (standar deviasi, varians, range, deviasi kuartil, mean deviasi, dan sebagainya).

2. Metode analisis tujuan kedua

Metode analisis data yang digunakan untuk menjawab tujuan kedua yakni menganalisis perubahan struktural masing-masing kabupaten Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Provinsi Lampung dengan metode analisis *Shift Share*. Menurut Suhandi dan Hakin (2021) Analisis ini merupakan salah satu teknik kuantitatif yang biasa digunakan untuk menganalisis perubahan struktur ekonomi suatu wilayah terhadap struktur ekonomi wilayah administratif yang lebih luas sebagai referensi.

Shift Share (SS) merupakan gabungan dari *National share* (PN), ditambah *Proportional shift* (PP), dan *Differential shift* (PPW) (Suhandi dan Hakin, 2021).

- a. *National share* (PN), untuk melihat bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi nasional terhadap daerah. Hal ini dilakukan dengan cara menganalisis perubahan pengerjaan agregat secara sektoral dibandingkan dengan perubahan pada sektor yang sama di perekonomian yang dijadikan acuan.
- b. *Proportional shift* (PP), untuk mengukur perubahan pertumbuhan atau penurunan pada daerah dibandingkan dengan perekonomian yang lebih besar yang dijadikan acuan. Pengukuran ini dapat mengetahui apakah perekonomian

daerah terkonsentrasi pada sektor-sektor yang tumbuh lebih cepat dibanding perekonomian yang dijadikan acuan.

- c. *Differential shift* (PPW), untuk menentukan seberapa jauh daya saing suatu sektor ekonomi di daerah (lokal) dengan perekonomian yang cakupannya lebih besar yang dijadikan acuan

Menurut Oelietina (2022) Pergeseran Bersih (PB) adalah penjumlahan dari PP dan PPW, apabila PB lebih besar atau sama dengan nol maka dapat dikatakan bahwa pertumbuhan sektor i di wilayah kabupaten j termasuk ke dalam kelompok progresif (pertumbuhan maju) demikian bila PB kurang dari nol maka pertumbuhan sektor i pada wilayah kabupaten j masuk ke dalam kelompok konservatif (pertumbuhan lambat).

3. Metode analisis tujuan ketiga

Teknik analisis yang digunakan dalam menganalisis tujuan ketiga dari penelitian ini adalah analisis deskriptif dan teknik *overlay* peta. *Overlay* menampakkan suatu peta digital pada peta digital yang lain beserta atribut-atributnya dan menghasilkan peta gabungan keduanya yang memiliki informasi atribut dari kedua peta (Hidayat, 2013). Hidayat juga menambahkan bahwasanya pemahaman bahwa overlay peta (minimal 2 peta) harus menghasilkan peta baru adalah hal mutlak.

Teknik analisis overlay dalam penelitian ini digunakan sebagai alat analisis untuk melihat perubahan struktur ruang dan pola ruang. Perubahan sistem jaringan prasarana utama dan sistem jaringan prasarana lainnya yang terdapat di Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri dapat dilihat dari perubahan secara fisik dimana sebagai hasil dari overlay peta. Begitu pula Analisis pola ruang dalam mengetahui perubahan guna lahan dari masing-masing kawasan lindung maupun kawasan budidaya yang termasuk ke dalam pola ruang. Overlay peta juga dilakukan dalam menentukan lokasi wilayah industri (Rianto dan Santoso, 2018). Perubahan tersebut dilihat berdasarkan RTRW Provinsi Lampung Perda No 1 tahun 2010 dengan RTRW Provinsi Lampung setelah perubahan yakni Perda No 12 tahun 2019 serta dilihat dari data citra satelit. Selanjutnya penggabungan peta dari

RTRW Provinsi Lampung Perda No 1 tahun 2010 dengan RTRW Provinsi Lampung Perda No 12 tahun 2019 tersebut nantinya dapat diketahui seberapa besar perubahan yang terjadi akibat dari penetapan WPPI.

IV. GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Lampung

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, Provinsi Lampung merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di ujung selatan Pulau Sumatera dengan luas wilayah 33.553,55 Km². Secara Geografis Provinsi Lampung terletak pada kedudukan Timur - Barat berada antara : 103° 40' - 105° 50' Bujur Timur • Utara - Selatan berada antara : 6° 45' - 3°45' Lintang Selatan Adapun daftar kecamatan yang ada di Kota Bandar Lampung sebagai berikut:

Tabel 5. Daftar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung

No	Kabupaten/Kota	Ibukota	Luas Wilayah (Km ²)
1	Lampung Barat	Liwa	2.142,78
2	Tanggamus	Kota Agung	3,020.64
3	Lampung Selatan	Kalianda	3,319.04
4	Lampung Timur	Sukadana	5,325.03
5	Lampung Tengah	Gunung Sugih	3,802.68
6	Lampung Utara	Kotabumi	2.725,87
7	Way Kanan	Blambangan Umpu	3.921,63
8	Tulang Bawang	Menggala	3,196.32
9	Pesawaran	Gedong Tataan	2,243.51
10	Pringswu	Pringsewu	625,00
11	Mesuji	Mesuji	2.184,00
12	Tulang Bawang Barat	Panaragan Jaya	1.201,00
13	Pesisir Barat	Krui	2,907.23
14	Kota Bandar Lampung	Kota Bandar Lampung	92,96
15	Kota Metro	Kota Metro	61,79

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2023

Batas wilayah Provinsi Lampung dilihat secara administratif yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Hindia
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa



Gambar 5. Peta Administrasi Provinsi Lampung
Sumber: BAPPEDA Provinsi Lampung

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu penggambaran bagi suatu wilayah dalam merepresentasikan kemampuan wilayahnya guna menciptakan nilai tambah dalam kurun waktu tertentu. Nilai PDRB tertinggi pada tahun 2021 Provinsi Lampung yakni Kabupaten Lampung Tengah dengan Rp 74.335.949,95 juta.

Tabel 6. PDRB Provinsi Lampung 2019-2021

Kabupaten/Kota	Produk Domestik Regional Bruto Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah) Harga Konstan		
	2019	2020	2021
	Lampung Barat	4984128.87	4926295.10
Tanggamus	10872102.25	10679320.71	10924781.96
Lampung Selatan	30267878.04	29743296.07	30541213.49
Lampung Timur	29599686.88	28931291.08	29000403.64
Lampung Tengah	47836745.04	47347968.85	48710037.92
Lampung Utara	16508059.89	16269343.78	16727891.87
Way Kanan	9573820.86	9462309.19	9736500.03
Tulang Bawang	15826209.47	15613891.94	16062916.85
Pesawaran	11402094.07	11258773.53	11492493.41
Pringsewu	7741503.33	7647661.68	7870161.61
Mesuji	7005862.48	6911117.82	7107313.38
Tulang Bawang Barat	7850702.10	7747240.45	7970780.97
Pesisir Barat	3106109.36	3069604.94	3133189.56
Bandar Lampung	39373235.33	38632202.62	39818097.83
Metro	4312384.73	4234999.85	4358386.24

Sumber: BPS Provinsi Lampung, 2021

Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung mendata jumlah Industri Kecil Menengah melalui platform digital yang berbasis website bernama Galerry sIKaM. Terlihat bahwa di wilayah WPPI, Kabupaten Lampung Selatan memiliki jumlah IKM terdaftar paling banyak dibanding 4 kabupaten WPPI lainnya dengan jenis IKM berupa food sejumlah 40 unit IKM. Jumlah IKM yang terdaftar di 5 kabupaten WPPI dapat dilihat dalam tabel berikut;

Tabel 7. IKM yang Terdaftar di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung

Kabupaten	Fashion	Kriya	Food	Logam	Produk Lainnya
Lampung Barat	1	4	23	-	11
Lampung Timur	1	6	17	2	11
Tanggamus	2	6	15	1	7
Lampung Tengah	-	4	12	4	8
Lampung Selatan	3	14	40	5	24

Sumber: Disperindag Lampung, 2023

B. Gambaran Umum Lampung Tengah

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lampung Tengah merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota kabupaten Gunung Sugih. Kabupaten Lampung Tengah memiliki luas wilayah 4545,5 Km² dengan kecamatan terbesar yaitu Kecamatan Bandar mataram dan kecamatan terkecil Kecamatan Kota Agung. Secara geografis, Kabupaten Lampung Tengah terletak pada 104' 35' sampai 105' 50' Bujur Timur dan 4' 30' sampai 4'15' Lintang Selatan. Kabupaten Lampung Tengah terdiri dari 28 kecamatan dan 301 kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Lampung Tengah dilihat secara administratif yakni sebagai berikut:

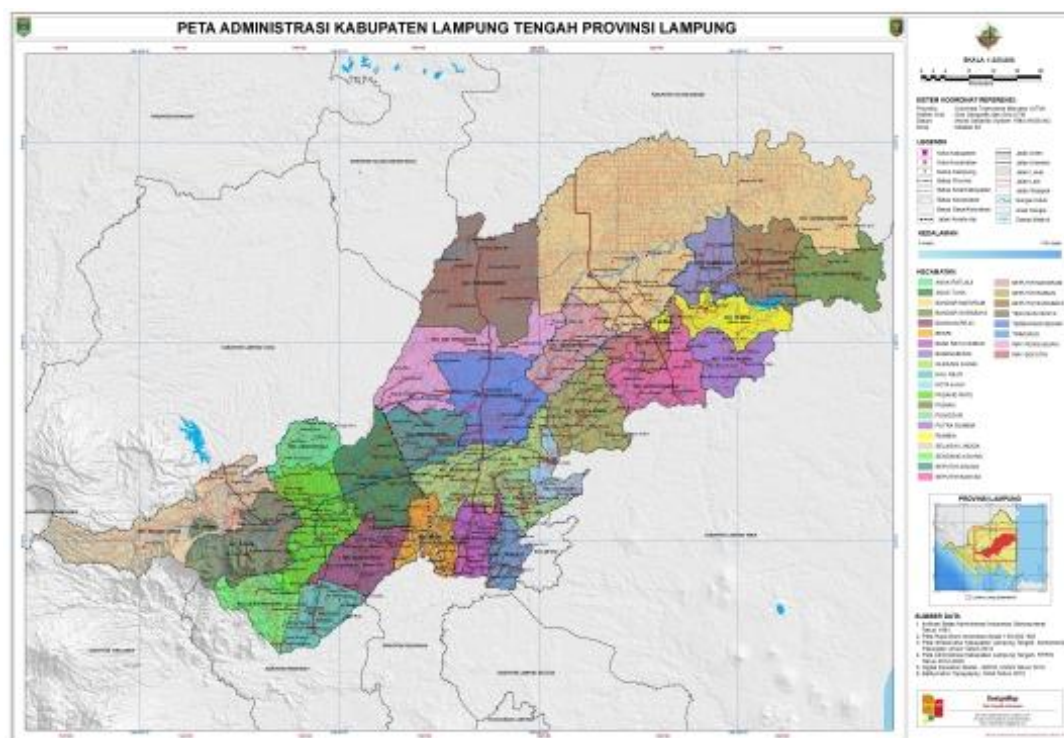
1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Lampung Utara
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Lampung Timur, dan Kota Metro
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Tanggamus

Adapun daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:

Tabel 8. Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah

Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area	Daftar Desa
Padang Ratu	Haduyang Ratu	164.00	15
Selagai Lingga	Negri Katon	272.63	14
Pubian	Negri Kepayungan	187.40	20
Anak Tuha	Negara Aji Tua	162.68	12
Anak Ratu AJi	Gedung Sari	70.22	6
Kalirejo	Kalirejo	111.90	17
Sendang Agung	Sendang Agung	97.90	9
Bangun Rejo	Bangun Rejo	104.88	17
Gunung Sugih	Gunung Sugih	164.01	11
Bekri	Kusumadadi	94.15	8
Bumi Ratu Nuban	Bulusari	63.71	10
Trimurjo	Simbarwaringin	64.18	11
Punggur	Tanggul Angin	60.70	9
Kota Gajah	Kota Gajah	46.90	7
Seputih Raman	Rukti Harjo	130.00	12
Terbanggi Besar	Terbanggi Besar	217.15	7
Seputih Agung	Dono Arum	106.96	10
Way Pengubuan	Tanjung Ratu Ilir	214.48	8
Terusan Nunyai	Gunung Batin Ilir	289.69	7
Seputih Mataram	Kurnia Mataram	115.96	12
Bandar Mataram	Jati Datar	1017.89	9
Seputih Banyak	Tanjung Harapan	136.62	13
Way Seputih	Suko Binangun	62.34	6
Rumbia	Reno Basuki	118.39	9
Bumi Nabung	Bumi Nabung Ilir	97.75	7
Putra Rumbia	Binakarya Utama	93.38	10
Seputih Surabaya	Gaya Baru Satu	141.55	13
Bandar Surabaya	Surabaya Ilir	138.09	10
Lampung Tengah	Haduyang Ratu	4545.50	301

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2023



Gambar 6. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Tengah
Sumber: Peta Tematik Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu penggambaran bagi suatu wilayah dalam merepresentasikan kemampuan wilayahnya guna menciptakan nilai tambah dalam kurun waktu tertentu. Nilai PDRB tertinggi Kabupaten Lampung Tengah dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2022 sebesar 50973 Miliar Rupiah.

Berdasarkan data BPS Kabupaten Lampung Tengah, adapun 5 sektor penyumbang PDRB terbesar di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; konstruksi dan pertambangan dan penggalian. Sektor industri pengolahan menjadi salah satu sektor dengan penyumbang PDRB terbesar di Kabupaten Lampung Tengah.

Tabel 9. PDRB ADHK Kabupaten Lampung Tengah 2018-2022 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15758	15925	16052	15985	16472
B Pertambangan dan Penggalian	2083	2208	2281	2235	2276
C Industri Pengolahan	10328	11301	10777	11443	11506
D Pengadaan Listrik dan Gas	52	56	60	62	65
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	16	16	17	19	19
F Konstruksi	5036	5389	5279	5655	5945
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4801	5136	4939	5120	6018
H Transportasi dan Pergudangan	1249	1330	1274	1305	1594
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	454	489	464	457	513
J Informasi dan Komunikasi	1789	1931	2051	2182	2204
K Jasa Keuangan dan Asuransi	696	720	747	765	740
L Real Estate	894	938	909	927	962
M,N Jasa Perusahaan	47	49	49	50	58
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	688	720	750	779	769
P Jasa Pendidikan	1027	1109	1162	1181	1222
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	240	251	279	288	288
R,S,T,U Jasa lainnya	249	269	258	257	323
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	45406	47837	47348	48710	50973

Sumber: BPS Kabupaten Lampung Tengah, 2023

Kabupaten Lampung Tengah memiliki industri unggulan berupa industri makanan yang tersebar di hampir seluruh kecamatan dengan kategori industri ikan dan biota air; industri minyak dan lemak nabati dan hewani; industri padi, tepung, dan pati; serta industri buah dan sayur. Selain itu, terdapat pula industri unggulan lainnya berupa industri karet dan industri kayu, gabus, bambu, rotan. Sebaran industri unggulan di Kabupaten Lampung Tengah dijelaskan dalam tabel berikut;

Tabel 10. Industri Unggulan di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah

Industri Unggulan					
Ikan dan Biota Air	Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	Padi, Tepung, dan Pati	Buah dan Sayur	Kayu, Gabus, Bambu, Rotan	Karet dan Plastik
Padang ratu; Selagi lingga; Pubian; Anak Tuha, Anak Ratu Aji; Kali Reji; Sendang Agung; Bangun rejo; Bekri; Bumi Ratu Bangun rejo; Bekri; Bumi Ratu Nuban; Trimurjo; Punggur; Nuban; Trimurjo; Punggur; Terbangi Besar; Seputih Agung; Way pengubuan; Terusan Nunyai; Seputih mataram; Seputih Banyak; Rumbia; Seputih Banyak; Rumbia; Bumi nabung; Putra rumbia.	Padang Ratu; Selagi Lingga; Pubian; Anak Tuha; Anak Ratu Aji; Kali Reji; Sendang Agung; Bangun Rejo; Bekri; Bumi Ratu Nuban; Trimurjo; Punggur; Kota Gajah; Seputih Raman; Terbangi Besar; Seputih Agung; Way Pengubuan; Terusan Nunyai; Seputih Mataram; Bandar Mataram; Seputih Banyak; Way Seputih; Rumbia; Bumi Nabung; Putra Rumbia; Seputih Surabaya; Bandar Surabaya.	Padang Ratu; Selagi Lingga; Pubian; Anak Tuha; Anak Ratu Aji; Kali Reji; Sendang Agung; Bangun Rejo; Bekri; Bumi Ratu Nuban; Trimurjo; Punggur; Kota Gajah; Seputih Raman; Terbangi Besar; Seputih Agung; Way Pengubuan; Terusan Nunyai; Seputih Mataram; Bandar Mataram; Seputih Banyak; Way Seputih; Rumbia; Bumi Nabung; Putra Rumbia; Seputih Surabaya; Bandar Surabaya.	Padang Ratu, Selagi Lingga, Pubian, Anak Tuha, Anak Ratu Aji, Kali Reji, Sendang Agung, Bangun Rejo, Bekri, Bumi Ratu Nuban, Trimurjo, Punggur, Kota Gajah, Seputih Raman, Terbangi Besar, Seputih Agung, Way Pengubuan, Terusan Nunyai, Seputih Mataram, Bandar Mataram, Seputih Banyak, Way Seputih, Rumbia, Bumi Nabung, Putra Rumbia, Seputih Surabaya, Bandar Surabaya.	Padang Ratu; Rumbia	Bekri

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016-2035

C. Gambaran Umum Tanggamus

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Tanggamus merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota kabupaten Gedong Tataan. Tanggamus memiliki luas wilayah 4.654,96 Km² Secara geografis, Kabupaten Tanggamus terletak pada 5°05' sampai 5°56' LS dan 104°18' sampai 105°12' BT. Kabupaten Tanggamus terdiri dari 20 kecamatan dan 126 kelurahan. Adapun daftar kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus sebagai berikut:

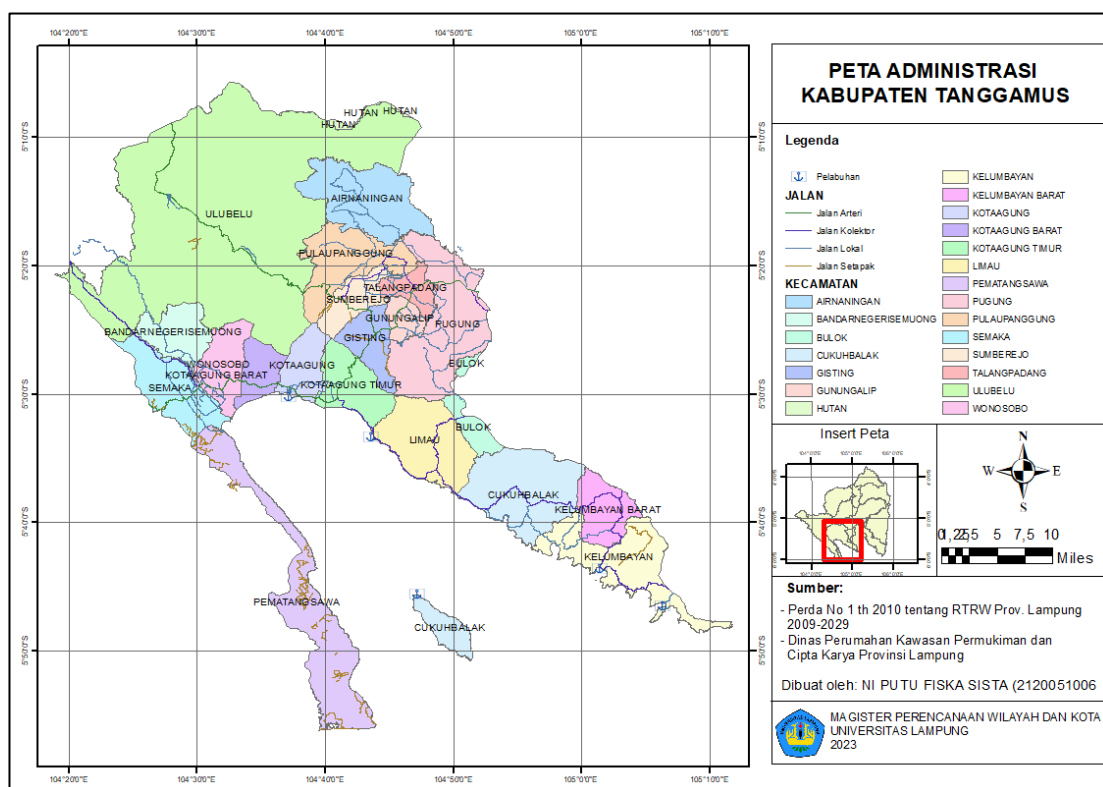
Tabel 11. Daftar Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

Kecamatan	Luas (km²)	Persentase
Wonosobo	209,63	4,50
Semaka	170,9	3,67
Bandar Negeri Semuong	98,12	2,11
Kota Agung	76,93	1,65
Pematang Sawa	185,29	3,98
Kota Agung Barat	101,3	2,18
Kota Agung Timur	73,33	1,58
Pulau Panggung	437,21	9,39
Ulu Belu	323,08	6,94
Air Naningan	186,35	4,00
Talang Padang	45,13	0,97
Sumberejo	56,77	1,22
Gisting	32,53	0,70
Gunung Alip	25,68	0,55
Pugung	232,4	4,99
Bulok	51,68	1,11
Cukuh Balak	133,76	2,87
Kelumbayan	121,09	2,60
Limau	240,61	5,17
Kelumbayan Barat	53,67	1,15
Total	4 654.96	100,00

Sumber: Kabupaten Tanggamus dalam Angka 2023

Batas wilayah Kabupaten Tanggamus dilihat secara administratif yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat dan Kabupaten Lampung Tengah
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Lampung Barat
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Pringsewu



Gambar 7. Peta Administrasi Kabupaten Tanggamus
Sumber: Hasil Olah Data, 2023

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu penggambaran bagi suatu wilayah dalam merepresentasikan kemampuan wilayahnya guna menciptakan nilai tambah dalam kurun waktu tertentu. Nilai PDRB tertinggi Kabupaten Lampung Barat dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2022 sebesar 5260,7 Miliar Rupiah.

Tabel 12. PDRB ADHK Kabupaten Tanggamus 2018-2021

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4465070	4511112	4411691	4323365	4393393
B Pertambangan dan Penggalian	727896	768754	787976	740069	705894
C Industri Pengolahan	681370	715748	690048	721040	729253
D Pengadaan Listrik dan Gas	8000	8927	9277	8352	8930
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	11359	12309	13429	13938	14565
F Konstruksi	705912	773854	754424	826812	863129
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1063223	1176374	1079900	1241874	1409706
H Transportasi dan Pergudangan	518036	567142	538509	569373	694036
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	176880	194636	182411	179806	205218
J Informasi dan Komunikasi	382815	419888	455741	485997	487940
K Jasa Keuangan dan Asuransi	189564	196405	202300	207841	207416
L Real Estate	309478	330095	319097	324277	336514
M,N Jasa Perusahaan	8341	8608	8495	8537	10063
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	429699	452089	469695	491260	485632
P Jasa Pendidikan	423351	465073	476850	484545	498134
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	130256	138847	153550	179821	179529
R,S,T,U Jasa lainnya	120849	132240	124926	122313	154984
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10352099	10872102	10679321	10924782	10924782

Sumber: BPS Kabupaten Tanggamus, 2023

Kabupaten Tanggamus memiliki industri unggulan berupa industri makanan yang tersebar di hampir seluruh kecamatan dengan kategori industri ikan dan biota air; industri minyak dan lemak nabati dan hewani; industri padi, tepung, dan pati; serta industri buah dan sayur. Selain itu, terdapat pula industri unggulan lainnya berupa industri minuman, industri karet dan industri kayu, gabus, bambu, rotan. Sebaran industri unggulan di Kabupaten Tanggamus dijelaskan dalam tabel berikut;

Tabel 13. Industri Unggulan di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Tanggamus

Industri Unggulan (Industri Makanan)						
Ikan dan Biota Air	Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	Padi, Tepung, dan Pati	Buah dan Sayur	Minuman	Kayu, Gabus, Bambu Rotan	Karet dan Plastik
Kota Agung; Wonosobo; Cukuh; Balak; Semaka; Kelumbayan Pematang; Sawah; Sumberejo; Pagelaran; Pugung;	Limau; Cukubalak Kota Agung Timur; Pematang Sawah; Kota Agung; Semaka; Wonosobo.	Semaka; Pugung; Pematang Sawah; Kota Agung Timur; Gunung Alip; Bulok.	Kota Agung, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo.	Kota Agung; Kota Agung Timur	Talang Padang	Ulu Belu; Pugung; Air Naningan

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016-2035

D. Gambaran Umum Lampung Selatan

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik, Kabupaten Lampung Selatan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung dengan ibu kota kabupaten Kalianda. Kabupaten Lampung Selatan memiliki luas wilayah 2.109,74 Km². Secara geografis, Kabupaten Lampung Selatan terletak pada 5°15' sampai 6° LS dan 105°14' sampai 105°45' BT. Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 kecamatan dan 260 desa/kelurahan.

Batas wilayah Kabupaten Lampung Selatan dilihat secara administratif yakni sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Lampung Timur
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Sunda
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pesawaran dan Kota Bandar Lampung
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa

Adapun daftar kecamatan yang ada di Lampung Selatan sebagai berikut:

Tabel 14. Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan	Ibu Kota	Luas Wilayah (km ²)
Natar	Merak Batin	25.088
Jati Agung	Marga Agung	16.447
Tanjung Bintang	Jati Baru	12.972
Tanjung Sari	Kerto Sari	10.332
Katibung	Tanjung Ratu	18.862
Merbau Mataram	Merbau Mataram	11.394
Way Sulan	Karang Pucung	4.654
Sidomulyo	Sidorejo	15.899
Candipuro	Titiwangi	8.490
Way Panji	Sidoharjo	3.845
Kalianda	Kalianda	17.982
Rajabasa	Banding	10.039
Palas	Bangunan	16.557
Sragi	Kuala Sekampung	9.344
Penengahan	Pasuruan	12.496
Ketapang	Bangun Rejo	10.860

Su
mbe
r:
Kab
upat
en
La
mp
ung
Sela
tan
dala
m
Ang
ka
202
3



Gambar 8. Peta Administrasi Kabupaten Lampung Selatan
Sumber: Peta Tematik Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi salah satu penggambaran bagi suatu wilayah dalam merepresentasikan kemampuan wilayahnya guna menciptakan nilai tambah dalam kurun waktu tertentu. Nilai PDRB tertinggi Kabupaten Lampung Selatan dalam 5 (lima) tahun terakhir yakni pada tahun 2022 sebesar 32040 Miliar Rupiah.

Tabel 15. PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2018-2021 (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	2018	2019	2020	2021	2022
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	66941	67849	68312	67996	69369
B Pertambangan dan Penggalian	13685	14054	13531	12817	12319
C Industri Pengolahan	43218	46778	44336	46351	46567
D Pengadaan Listrik dan Gas	397	435	432	403	428
E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	231	243	255	273	283
F Konstruksi	22798	24169	23674	25319	26293
G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	28251	30275	28278	30612	35309
H Transportasi dan Pergudangan	11935	12899	12175	12449	14982
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3358	3663	3480	3426	3858
J Informasi dan Komunikasi	11137	12024	12988	13816	13863
K Jasa Keuangan dan Asuransi	4784	4920	5105	5207	5021
L Real Estate	7045	7460	7330	7427	7680
M,N Jasa Perusahaan	322	335	330	333	392
O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7121	7462	7830	8127	8025
P Jasa Pendidikan	6558	7105	7397	7487	7678
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2249	2402	2665	2768	2765
R,S,T,U Jasa lainnya	2135	2308	2202	2155	2703
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	232166	244378	240320	246966	257534

Sumber: Kabupaten Lampung Selatan dalam Angka 2023

Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan merupakan tiga sektor dengan distribusi kontribusi PDRB terbesar dari sektor lainnya. Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan sektor terbesar menyumbang 69369 Miliar Rupiah di tahun 2022. Sedangkan sektor Jasa Perusahaan merupakan sektor dengan kontribusi distribusi PDRB terkecil yaitu 392 Miliar Rupiah di tahun 2022.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki industri unggulan berupa industri makanan yang tersebar di hanya beberapa kecamatan dengan kategori industri ikan dan biota air; industri minyak dan lemak nabati dan hewani; serta industri padi, tepung, dan pati. Selain itu, terdapat pula industri unggulan lainnya berupa industri karet dan industri kayu, gabus, bambu, rotan. Sebaran industri unggulan di Kabupaten Lampung Selatan dijelaskan dalam tabel berikut;

Tabel 16. Industri Unggulan di Masing-Masing Kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan

Industri Unggulan (Industri Makanan)				
Ikan dan Biota Air	Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani	Padi, Tepung, dan Pati	Kayu, Gabus, BambuRotan	Karet dan Plastik
Ketapang	Katibung; Jati Agung; Merbau Mataram; Way Sulan; Candipuro; Natar.	Sidomulyo	Candipuro	Natar; Tanjung Bintang

Sumber: Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016-2035

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Sebelum penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor industri pengolahan, dan sektor perdagangan besar dan eceran menjadi sektor dengan kontribusi distribusi PDRB terbesar masing-masing Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Selatan. Sesudah penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri, sektor industri pengolahan termasuk ke dalam sektor basis di Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Selatan, namun termasuk sektor non basis di Kabupaten Tanggamus.
2. Perubahan struktur ekonomi di tiga kabupaten yaitu Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Selatan menunjukkan bahwasanya perubahan pergeseran struktur ekonomi terjadi di masing-masing sektor di tiga kabupaten tersebut. Di Kabupaten Lampung Tengah, sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan yang mengalami tumbuh pesat. Di Kabupaten Tanggamus, sektor penyediaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, serta sektor jasa lainnya mengalami tumbuh pesat. Sedangkan di Kabupaten Lampung Selatan, sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib mengalami tumbuh pesat dibandingkan sektor lainnya.
3. Rencana pengembangan kawasan industri berdampak pada penambahan luasan kawasan industri dari yang sebelumnya 19102,282 Ha menjadi

35806,914 Ha. Rencana kawasan industri tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan peruntukan kawasan yang sebelumnya di dominasi peruntukan kawassan pertanian, kawasan permukiman dan kawasan perlindungan bagi kawasan di bawahnya menjadi peruntukan kawasan industri. Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Tanggamus, dan Kabupaten Lampung Selatan telah memiliki infrastruktur industri dan infrastruktur penunjang kawasan industri dalam peningkatan pengembangan wilayah di sektor industri di Provinsi Lampung..

B. Saran

1. Bagi Kementerian Perindustrian, Pemerintah Provinsi Lampung, dan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur, Lampung Barat, Lampung Tengah, Tanggamus, dan Lampung Selatan diperlukan sinergitas dan penyelarasan antara masing-masing rencana pngembangan baik Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota dengan Rencana Pengembangan Industri Provinsi/Kabupaten agar pengembangan sektor industri di Provinsi Lampung dapat berjalan dengan baik.
2. Bagi pihak swasta, penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam berinvestasi di masing-masing kabupaten yang termasuk ke dalam WPPI sehingga dapat meningkatkan pendapatan bagi kabupaten tersebut.
3. Bagi penelitian selanjutnya agar dapat menyelaraskan dan mempebaharui data penelitian dengan Rencana Tata Ruang terbaru sehingga penelitian dapat sesuai dengan kondisi terkini di lapangan serta menjadi bahan rujukan dan masukan dalam pengembangan sektor industri di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung (2010), Peraturan Daerah No 1 Tahun 2010 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2009-2029.
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Tengah (2012), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah No 1 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Kabupaten Lampung Tengah: Gunung Sugih
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus (2011), Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus No 16 Tahun 2011 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Kabupaten Tanggamus: Kota Agung Timur
- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (2012), Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan No 15 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2011-2031. Kabupaten Lampung Selatan: Kalianda
- Kementrian Perindustrian (2015), Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Jakarta: Jakarta Selatan
- Dinas Perindustrian Provinsi Lampung (2016), Peraturan Daerah Provinsi Lampung No. 13 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi Lampung 2016-2035. Lampung: Bandar Lampung
- Adiyaksa, F. (2020). Evaluasi Alih Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Industri di Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *JGISE: Journal of Geospatial Information Science and Engineering*, 3(1), 71-78.
- Adysahwan, A., Syafri, S., & Tato, S. (2022). Tipologi dan Perubahan Pemanfaatan Ruang: Studi Kasus Kabupaten Sinjai. *Urban and Regional Studies Journal*, 4(2), 94-101.
- Alghifarry, M. B., Wahdini, M., & Anestatia, A. I. (2020). Identifikasi Potensi Mineral Tambang di Daerah Tanggamus Menggunakan Citra Landsat 8. *Jurnal Geosains dan Remote Sensing*, 1(2), 97-104.
- Astuti, S. T., & Hidayat, W. (2021). Analisis Sektor Ekonomi Unggulan Kabupaten Bangkalan. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 4(2), 488-495.

- Christian, Y., Asdak, C., & Kendarto, D. R. (2021). Analisis Perubahan Penggunaan Lahan di Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Teknotan*, 15(1), 15.
- Darnilawati, D. (2018). Strategi Kutup Pertumbuhan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi*, 26(2), 138-150.
- Gunawan, A. (2022). Analisis Potensi Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri Pengolahan Non Migas Di Provinsi Lampung Periode 2014-2020.
- Hakim, L. N., & Suhendi, A. (2021). Analisis Location Quotion versus Sumbangan Terhadap Pendapatan Domestik Regional Bruto dalam Penentuan Kawasan Ekonomi Basis di Provinsi Lampung. *GEMA: Journal of Gentiaras Management and Accounting*, 13(2), 120-134.
- Hasanah, F., Setiawan, I., Noor, T. I., & Yudha, E. P. (2021). Analisis Potensi Sektor Unggulan dan Perubahan Struktur Ekonomi di Kabupaten Serang Provinsi Banten Analysis of Potential Leading Sectors And Changes In Economic Structure In Serang Regency Of Banten Province. *Jurnal Pemikiran Masyarakat Ilmiah Berwawasan Agribisnis. Januari*, 7(1), 947-960.
- Hasan, M., & Azis, M. (2018). Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal.
- Hidayat, R. T. (2013). Pemetaan Lahan Investasi di Kabupaten Lampung Tengah, Lampung Timur dan Lampung Selatan. *Lampung: Universitas Lampung*.
- Hutapea, A., Koleangan, R. A., & Rorong, I. P. (2020). Analisis Sektor Basis Dan non Basis serta daya saing ekonomi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi kota Medan. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 20(03).
- Homer, E. N., Wicaksono, A. D., & Usman, F. (2016). Penentuan jenis klaster industri di kawasan industri arar kabupaten sorong berdasarkan metode delphi dan analytical hierarchi process (ahp). *The Indonesian Green Technology Journal*, 5(1), 16-23.
- Ismail, Z., Rois, A., & Agus, A. (2012). Priyono and. *Teori Ekonomi. Surabaya: Dharma Ilmu*.
- Kasikoen, K. M. (2018). Analisis Shift Share untuk Perencanaan Wilayah (Studi Kasus–Kabupaten Bogor). In *Forum Ilmiah* (Vol. 15, No. 3, pp. 442-448).
- Lahagina, J. J. (2015). Kajian Struktur Ruang Kota Tomohon. *SPASIAL*, 1(1), 45-53.
- Latief, R., Barkey, R. A., & Suhaeb, M. I. (2021). Perubahan Penggunaan Lahan Terhadap Banjir di Kawasan Daerah Aliran Sungai Maros. *Urban and Regional Studies Journal*, 3(2), 52-59.
- Lestari, E. P. (2010). Penguatan ekonomi industri kecil dan menengah melalui platform klaster industri. *Jurnal Organisasi dan manajemen*, 6(2), 146-157

- Lolos, D. J., Pakasi, C. B., & Talumingan, C. (2020). Pergeseran Struktur Perekonomian di Kabupaten Minahasa Utara (The Shifting of Economic Structure in North Minahasa Regency). *Journal of Agribusiness and Rural Development (Jurnal Agribisnis dan Pengembangan Pedesaan)*, 2(1).
- Mahaesa, R., & Huda, S. (2022). Potensi Sektor Unggulan Kabupaten Pasuruan Dan Kabupaten Mojokerto. *Jdep*, 5(1).
- Mahroji, D., & Indrawati, M. (2019). Analisis sektor unggulan dan spesialisasi regional Kota Bandar Lampung. *Jurnal Ekobis: Ekonomi Bisnis & Manajemen*, 9(1), 01-08.
- Muhson, A. (2006). Teknik analisis kuantitatif. *Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta*, 183-196.
- Nurbani, S. N. (2020). Analisa Potensi Industri Berdasarkan Pada Sumber Daya Alam Di WPPI Sulawesi Tenggara. *Rekayasa Industri dan Mesin (ReTIMS)*, 1(2), 120-128.
- Oeliestina, O. (2022). Melihat pergeseran struktur perekonomian jawa timur selama pandemi covid-19 dengan Analisis Shift Share. *JAE (Jurnal Akuntansi dan Ekonomi)*, 7(3), 68-79.
- Paramasatya, A., & Rudiarto, I. (2020). Implikasi Penetapan Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri Terhadap Penggunaan Lahan di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 16(2), 144-157.
- Prakasa, R. R. (2020). Kajian Perkembangan Struktur dan Pola Ruang Permukiman Kecamatan Banyumanik. *Jurnal Planoeearth*, 5(2), 115-119.
- Pratikno, D. D. (2021). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Perubahan Struktur Perekonomian Provinsi Lampung. *Salam (Islamic Economics Journal)*, 2(1), 42-60.
- Pribadi, Y. (2021). Pengukuran Daya Saing Kabupaten Lampung Tengah: Metode Location Quotient Dan Shift-Share Analysis. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 9(03), 299-299
- Puspitaningsih, A., Djauhar, A., & Permana, T. (2021). Analisis Perubahan Struktur Ekonomi Dan Sektor Unggulan Kota Kendari Tahun 2010-2020. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 1(3), 135-140
- Refta Sella, T. (2022). *Analisis Kesesuaian Lahan Komoditas Unggulan Perkebunan Di Kabupaten Tanggamus* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang).
- Rianto, I. B., & Santoso, E. B. (2018). Penentuan Lokasi Kawasan Industri Tekstil Terpadu di Kabupaten Majalengka. *Jurnal Teknik ITS*, 7(1), C19-C23
- Rozaki, Z. (2020, February). Decrease of agricultural land and industry growth in Special Region of Yogyakarta. In *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 458, No. 1, p. 012033). IOP Publishing.

- Salakory, H. S. M., & Matulesy, F. S. (2020). Analisis shift-share terhadap perekonomian Kota Sorong. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika Dan Terapan*, 14(4), 575-586.
- Salindeho, B. A., Rotinsulu, D. C., & Sumual, J. I. (2023). Analisis Perubahan Struktur Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017-2021. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 23(4), 97-108
- Samuel, E. J. J., Engka, D. S., & Rorong, I. P. F. (2022). Analisis Potensi Perekonomian Kepulauan Maluku. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(8), 61-72
- Santoso, D. B. (2021). The impact of industrial development zones designation on the convergence of economic growth in East Java. *Applied Economics*, 53(49), 5731-5737.
- Sudjamorko, B., & Wahyudi, A. (2011). Pengembangan Industri Klaster Jambu Mete di Jawa Timur. *Buletin RISTRI*, 2(2), 251-264.
- Soamole, C. F. (2011). *Konsep Pola Ruang Permukiman Kampung Arab studi kasus: Kelurahan Kauman dan Kelurahan Kasin Kota Malang* (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Malang).
- Sudjamorko, B., & Wahyudi, A. (2011). Pengembangan industri klaster jambu mete di Jawa Timur. *Buletin RISTRI*, 2(2), 251-264.
- Suhandi, S., & Hakin, N. (2021). Analisis Overlay Sektor Unggulan Provinsi Banten. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 14(2), 268-280.
- Sungkawa, I., Trisnarningsih, U., & Mahmuda, S. M. M. (2019). Analisis Location Quotient (LQ) Potensi Wilayah Kecamatan Berbasis Sektor Pertanian di Kabupaten Cirebon. *Agrijati Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 32(2), 48-67.
- Sundaro, H., & Sudrajat, A. S. E. (2019). Analisis Pengembangan Wilayah Kota Semarang Berbasis Potensi Unggulan Daerah. *Jurnal Riptek*, 13(1), 29-38.
- Suseno, D. P., Soedarsono, S., & Anindyawati, N. (2017). Analisis Dampak Jalan Tol Terhadap Faktor Sosial, Ekonomi Dan Lingkungan Di Desa Kaligangsa Kulon Kabupaten Brebes (Studi Kasus Area Pintu Tol Brebes Timur). *Prosiding Sains Nasional dan Teknologi*, 1(1).
- Tambunan, T. (2005). Promoting Small and Medium Enterprises With A Clustering Approach: A policy experience from Indonesia. *Journal of Small Business Management*, 43(2), 138-154.
- Tarigan, R. 2005. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta : PT Bumi Aksara
- Tarigan R. 2009. Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta(ID) : Bumi Aksara
- Zakaria, Z., Zulham, T., & Gunawan, E. (2018). Analisis Struktur Ekonomi Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(1), 44-55.

Zamaya, Y., & Tampubolon, D. (2021). Kebijakan penentuan pusat pertumbuhan industri untuk mendukung pembangunan daerah. *Jurnal Niara*, 14(2), 101-111